



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,  
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
TAMBAHAN)**

**J A K A R T A**

**RABU, 12 FEBRUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Rifai dan Yevri Sudianto

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

**Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 13.00 – 15.01 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

1. Fransisca

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Makhfud
2. Muspani

**B. Ahli Dari Pemohon:**

1. Feri Amsari

**C. Saksi Dari Pemohon:**

1. Edy Juniadi
2. Habi Burahman

**D. Termohon:**

1. Erina Okriani

**E. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Satria Budhi Pramana

**F. Ahli Dari Termohon:**

1. Ardilafiza

**G. Saksi Dari Termohon:**

1. Gusman Heriyadi
2. Reren Suryani
3. Melsi Kurnia

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Husni Thamrin
2. Ardyan

**I. Ahli Dari Pihak Terkait:**

1. Djohermansyah Djohan

**J. Saksi Dari Pihak Terkait:**

1. Sudimawan

**K. Bawaslu:**

1. Muhammad Arif Hidayat
2. Sahran

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:15]**

Kita mulai persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Hadir Kuasa Pemohon, saya Makhfud, dan kawan rekan saya, Muspani. Saya menghadirkan 2 Saksi, Saudara Edy Junaidi dan Habi Burahman, dan seorang Ahli Saudara Feri Amsari. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Baik. Dari Termohon, silakan.

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Perkenalkan, saya Satria Budhi Pramana, Yang Mulia. Kuasa Hukum dari KPU Bengkulu Selatan. Turut hadir bersama saya, Ketua KPU Bengkulu Selatan, Ibu Erina. Dan kami juga menghadirkan 2 orang Saksi, 1 orang Ahli dan 1 orang pemberi keterangan. Ahli atas nama Dr. arti ... Ardilafiza, pemberi keterangan anggota KPU Bengkulu Selatan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan atas nama Gusman Heriyadi, kemudian Ketua PPK Seginim ... anggota PPK Seginim, Ibu Reren Suryani, dan anggota PPS ke ... Kelurahan Ibul, Ibu Melsi Kurnia, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:26]**

Dari Pihak Terkait, silakan.

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [02:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:30]**

Walaikumsalam.

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [02:30]**

Hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum, saya sendiri Husni Thamrin, bersama dengan Ardyan. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan 1 orang Saksi dan 1 orang Ahli. Saksi bernama Sudimawan dan Ahli yaitu Prof. Djohermansyah Djohan. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:30]**

Baik, terima kasih untuk semuanya.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan Perkara PHPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Agendanya mendengarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan penyampaian alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Pihak.

Oleh karena itu, Para Ahli, supaya maju ke depan, Pak Feri, Pak Ardilafiza, dan Prof. Djohermansyah untuk mengucapkan sumpah dulu. Sekaligus Saksi-Saksinya, Saksi sebelah sini. Pak hab ... Edy Junaidi, Habi Burahman, Gusman Heriyadi, Reren Suryani, Melsi Kurnia, dan Sudimawan.

Kalau dari KPU masih ada yang aktif jadi komisioner? Tidak ada? Dari KPU? Tidak ada, ya?

**10. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [04:17]**

Masih ada, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:20]**

Yang mana?

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [04:21]**

Atas Nama Pak Gusman, Yang Mulia. Pemberi keterangan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:25]**

Masih komisioner? Bapak, tidak mengucapkan sumpah ya? Masih melekat ketika menjabat jadi komisioner.

**14. KETUA: SUHARTOYO [04:33]**

Silakan merapat, Pak. Semua agamanya Islam termasuk Ahli dan Saksi, jadi Yang Mulia Prof Guntur dapat berkenan membantu lafal sumpah untuk Ahli dan Saksi.

**15. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Para Ahli, Pak Feri Amsari, Pak Ardilafiza, dan Pak Djohermansyah Djohan. Bapak yang bersumpah, saya menuntun lafalnya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**16. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:48]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**17. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:25]**

Terima kasih, selanjutnya Para Saksi, Pak Edy Junaidi, Pak Habi Burahman, Pak ... Bu Reren Suryani, Melsi Kurnia, dan Pak Sudimawan, ya. Ikuti lafal sumpah, Ibu Bapak yang sumpah, ya. Tapi saya menuntun lafalnya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**18. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:25]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:07]**

Terima kasih.

**20. KETUA: SUHARTOYO [06:10]**

Baik, kembali ke tempat. Terima kasih, kita dengarkan dulu keterangan Ahli, nanti baru Para Saksi. Dipersilakan Pak Feri, waktunya 7 menit. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:41]**

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum mendengar keterangan Saksi dan Ahli yang kami ajukan, kami menyampaikan bukti tambahan ke Kepaniteraan kemarin, Yang Mulia, yaitu Bukti P-53 dan P ... P-53, P-54, dan P-56 berupa Per-Bub dan Perda. Per-Bub ini ditandatangani oleh Prinsipal 9 hari setelah menjadi Plt. Perdanya ditandatangani oleh Pihak Terkait 21 hari setelah menjadi Plt dan satu Perda lagi, yaitu ditandatangani 3 bulan 4 hari setelah Pihak Terkait menjadi Plt. Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: SUHARTOYO [07:31]**

Ya. Kan sudah diserahkan kan, Pak?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [07:33]**

Sudah, Yang Mulia.

**24. KETUA: SUHARTOYO [07:35]**

Ya. Baik, silakan Pak Feri.

**25. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [07:36]**

Terima kasih, yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, para pihak, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaali Muhammad.

Saya hendak memulai dengan memberikan gambaran bahwa sifat final dan mengikat putusan MK dalam berbagai putusannya sebenarnya dalam berbagai konteks, termasuk pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan calon kepala daerah petahana, mestinya sudah selesai ketika memahami konteks final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi, izinkan saya memberikan gambaran mengenai makna mengikat. Secara konstitusional sifat putusan MK itu secara eksplisit menyebutkan hanya frasa *final* sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi, dimana diterangkan secara eksplisit bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Dari mana kemudian pemaknaan final itu juga berarti mengikat? Tentu dari ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar itu sendiri, pada tingkat pertama dan terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum, sehingga tentu saja putusan itu mengikat sebagaimana makna final itu. Namun, hal yang sama mengenai makna final itu juga sudah dijelaskan di dalam penjelasan frasa *final* dari Penjelasan Pasal 10 ayat (1) di dalam Undang-Undang MK. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Jika kita simak Putusan 105/PUU-XIV/2016 terutama halaman 56, eksplisit dalam penjelasan ... dalam pertimbangan Mahkamah ditentukan bahwa siapa saja yang melawan putusan MK pada dasarnya akan menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi memang tidak menggunakan frasa *wajib dilaksanakan* sebagaimana dijelaskan dalam perkara ini, tetapi dengan sendirinya ketika Mahkamah menyatakan bahwa ini final and binding, maka termasuk di dalamnya pemaknaan wajib atau harus dilaksanakan. Tetapi, gara-gara tidak ada kata *wajib* itu kerap disimpangkan oleh para pihak, terutama yang berupaya mengabaikan putusan MK, sehingga timbul berbagai pemahaman dan pemaknaan, apalagi pada ruang politik kerap dimaknai berbeda dan dilaksanakan berbeda pula. Jadi, ada Hakim Konstitusi di luar ruangan Hakim Konstitusi, kurang lebih begitu, Yang Mulia.

Namun, pelaksanaan berbeda atau bahkan tidak melaksanakannya memiliki konsekuensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* yang menurut Ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berbagai unsur perbuatan melawan hukum perdata ini menginspirasi berbagai PMH dalam studi pidana maupun studi administrasi. Unsur-unsurnya adalah harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan ada kesalahan. Kalau disimak ketentuan pasal ... ketentuan Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsekuensi dari perbuatan melawan hukum atau dilarangnya 3 perbuatan karena melakukan wewenang, di antaranya adalah bukan wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan sewenang-wenang. Dimana salah satu cirinya adalah mengabaikan putusan peradilan yang punya konsekuensi bahwa tindakan atau kebijakan itu harus dianggap tidak sah.

Konsekuensi-konsekuensi dari pengabaian terhadap putusan MK atau berupa perbuatan melawan hukum itu, eksplisit disampaikan di dalam Putusan MK Nomor 105. MK menyebutkan, saya sadur bahasa putusannya. "Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi," putusan MK maksudnya, "maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi."

Sebagaimana kita ketahui, terdapat syarat administrasi untuk dapat menjadi calon kepala daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10/2016, yaitu belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.

Kalau disimak PPT saya, mudah-mudahan bisa ditayangkan, Yang Mulia. Ini tabel gambaran contoh yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105. Saya tidak tahu apakah teman-teman Panitia Pengganti sudah menerima PPT saya yang berupa tabel. Di dalam tabel itu nanti, Yang Mulia, mungkin bisa melihat tabelnya di dalam PPT. Saya menggambarkan bahwa terdapat Calon Bupati Bengkulu Selatan yang sejak tanggal 17 Mei 2018 telah dilantik sebagai pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan. Lalu juga sudah dilakukan pelantikan di tanggal 12 September 2018 sebagai pelaksana tugas bupati. Lalu pada tanggal 30 Januari 19 ... 2019 dan 19 Maret 2019 juga sudah dilantik menjadi pelaksana tugas. Lalu kemudian dilantik menjadi bupati definitif tanggal 13 Mei ... tanggal 3 Mei 2019 dan 10 Mei 2019. Setelah itu, kemudian bupati definitif hasil pemilihan pilkada serentak tahun 2020.

Pemahaman ini yang menimbulkan perbedaan cara pandang dari berbagai pihak, termasuk mungkin juga penyelenggara pilkada. Karena mungkin menghitungnya hanya dari bupati definitif saja. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat berbagai alat ukur dalam berbagai putusan. Alat ukur pertama, periode masa jabatan itu ditimbang karena berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, pada pertimbangan poin 3, poin 13 disebutkan, "Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan." Artinya jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjadi 1 kali masa jabatan. Makna setengah masa jabatan itu adalah 2 tahun, 6 bulan atau lebih.

Alat ukur kedua, di dalam Putusan Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/Tahun 2020 dengan pertimbangan berada di poin 3.17.3, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung 1 kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang

telah menjabat kepala daerah atau sebagai penjabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan.

**26. KETUA: SUHARTOYO [17:48]**

Waktunya, Pak Feri.

**27. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [17:50]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Cepat.

Yang ketiga, Putusan Nomor 2/PUU-XXI/Tahun 20 ... 2023, di pertimbangan poin 3.13, Mahkamah memberikan pendapat kata *menjabat* adalah masa jabatan yang dihitung 1 periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui Putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat sebagai definitif maupun pejabat sementara.

Itu sebabnya alat ukur ... yang keempat, melalui Putusan 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah bahkan menegaskan, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret, jadi Mahkamah tidak perlu menilai kasus konkret yang dipersoalkan Para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak. Khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang 10 Tahun 2016. Bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, riil atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Jadi tidak perlu harus waktu pelantikan.

**28. KETUA: SUHARTOYO [19:38]**

Ya. Sudah habis waktunya, nanti (...)

**29. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [19:39]**

Baik.

**30. KETUA: SUHARTOYO [19:39]**

Dilanjut kalo ada pertanyaan.

**31. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [19:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**32. KETUA: SUHARTOYO [19:41]**

Baik.

Dari Termohon, Pak Ardilafiza, silakan.

**33. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [19:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

**34. KETUA: SUHARTOYO [19:51]**

Walaikumsalam wr.wb.

**35. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [19:53]**

Yang Mulia Ketua Sidang, Pak Dr. Suhartoyo. Prof. Guntur sebagai Hakim Anggota, serta Prof ... Dr. Daniel Yusmic yang sebagai Hakim Anggota. Para Pihak yang tidak bisa saya sebut satu-satu karena waktu kita terbatas 7 menit, jadi saya enggak akan sebut satu-satu dari Para Pihak yang ada.

Yang Mulia, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan yang tertulis ada, kemudian yang ... yang Powerpoint-nya juga sudah saya sampaikan. Persoalan ini menarik menurut saya karena ada dua hal yang penting di sini adalah permohonan itu mengarah kepada masa jabatan. Yang kedua adalah permohonan itu meng ... mengarah kepada dugaan TSM.

Dari masa dapat ... masa jabatan ... perdebatan masa jabatan memang terjadi setelah adanya putusan-putusan MK yang ... yang diikuti dengan cara yang berbeda-beda oleh semua anggota. Kita paham MK selalu melakukan suatu terobosan-terobosan untuk mencari kelu ... alternatif pemikiran yang muncul ke permukaan. Sehingga jenis putusan pun itu meningkat, selalu meningkat dari tahun ke ... dari periode ke periode.

Bapak/Ibu yang kami hormati. Pertama, saya akan coba memaknai dulu adalah memaknai putusan MK. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pemohon ... Ahli Pemohon bahwa putusan MK itu final and binding dan itu tidak bisa kita ragukan bahwa dia adalah final and binding. Cuma di dalam konteks persoalan kita, ada 4 putusan MK yang secara konsisten sudah dijelaskan di dalam hal ini.

Yang pertama adalah putusan MK tahun ... Nomor 22/PUU-VII/2009, yang kebetulan pada saat itu ada yang ... adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tetapi materinya itu bisa berlaku secara terus menerus karena me ... dia memaknai Pasal 58 itu. Pasal ini, undang-undang ... putusan ini menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang yang sebelumnya di dalam Pasal 7 huruf n itu memang tidak menjelaskan bagaimana cara menghitung setengah ... 1 periode masa jabatan itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh kawan kita dari Pihak Pemohon.

Kemudian, persoalannya muncul ke permukaan. Bagaimana cara menghitung setengah itu apabila di tengah-tengah jalan ada yang berhenti di tengah jalan? Karena ternyata di dalam pimpinan atau kepala daerah itu ada 2 unsur yang melekat, yaitu ada wali ... ada gubernur, ada wakil gubernur, ada wali kota, ada wakil wali kota, ada bupati dan ada wakil bupati.

Adakalanya gubernur atau kepala daerah itu, itu bisa berhenti di tengah jalan. Bisa berhenti di tengah jalan ada 2 macam, ada berhenti sementara atau diberhentikan secara permanen. Ini yang persoalan, titik persoalannya. Sehingga menimbulkan beberapa permohonan ke MK yang MK sudah putusan permohonan itu adalah di dalam Putusan 67. Saya salut dengan putusan-putusan ini konsisten sekali dan menyatakan bahwa cara menghitungnya itu adalah memang betul-betul adalah setengah, itu dua setengah lebih, itu adalah 1 periode. Cuma timbul pertanyaan di dalam Putusan 67 yang juga menolak kemudian Putusan Nomor 2 Tahun 2023 dan Putusan 129. Itu yang ... yang perlu kita pahami.

Bahwa di dalam Putusan 67 itu adalah tuntutan Petition dari para ... Para Pemohon itu adalah menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota, atau menjabat sebagai pejabat gubernur itu yang diinginkan Petitionnya. Untuk menutup bagaimana menghitung kalau bupati karena ada Plt dan segala macamnya, pertimbangan Hakim yang ada pada saat itu adalah tidak terdapat masalah Konstitusional dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon a quo.

Yang kedua adalah, merupakan ranah implementasi norma dan bukan terkait dengan Inkonstitusionalitas, itu yang saya.

Yang ketiga, persyaratan calon itu diserahkan kepada mekanisme hukum yang ada, kalau ada yang dirugikan silakan selesaikan dengan prosedur hukum yang ada sehingga permohonan itu MK tolak, Amarnya ditolak. Kemudian, di dalam Putusan Nomor 2 kembali diuji ke MK pasal yang sama, yaitu adalah Pasal 7 ayat (2) N itu, yang di dalam Petitionnya pun juga menga ... menginginkan tidak hanya dimaknai berlaku untuk yang menjabat secara definitif, artinya yang tidak definitif juga bagian dari penghitungan jabatan, itu yang diinginkan.

Konsistensi MK dalam hal ini adalah bahwa dia sudah, MK sudah menyampaikan bahwa kembali kepada Putusan terdahulu Tahun 2009 dan sudah jelas di situ, jadi dia tidak membedakan dan cuma di dalam pertimbangan ha ... Hakim yang ada pada saat itu tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalankan tersebut baik yang menjabat sebag ... secara definitif maupun menjabat se ... penjabat sementara. Tetapi yang agak membingungkan saya menganalisisnya, awalnya adalah Permohonan itu ditolak.

Nah, kemudian juga di dalam Putusan 129 permohonan dilak ... kembali diajukan oleh Pak Helmi Hasan dan kawan-kawan, yaitu yang menginginkan Petitemnya itu menginginkan adanya konstitusional, kondisional konstitusional. Bahwa pengertian dari yang digugatnya itu adalah Pasal 161, ya, sejak ditandatangani berlakunya sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatan, bukan seperti apa yang diminta oleh Pasal 1 ... 61, ya, 1,2, dan 3, bahwa dia dihitung sejak pelantikan.

Apa yang kita lihat dalam pertimbangan MK? MK kembali merujuk pada masalah, putusan-putusan terdahulu khususnya Putusan Tahun 2009, ya. Bahwa pertimbangan Hakim merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, riil, dan faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan pelantikan, ini agak enggak tajam pertimbangannya. Tetapi anehnya putusan ... pertimbangan ini tidak melahirkan kep ... tidak lahir kepada put ... Amar Putusan, sehingga dia putusan itu ditolak oleh Mahkamah.

Analisis saya, bagaimana kok bisa begitu, harusnya kalau dia ada suatu rentetan kerangkanya di dalam hukum acara MK itu mulai dari Para Pihak, Termohon, Pemohon sampai dengan putusan itu ada saling keterkaitan. Kenapa ada keterkaitan? Bahwa pertimbangan hukum itu akan melahirkan putusan tetapi pertimbangan hukumnya yang notabene saya ... kita lihat adalah seiring dengan Petitem yang ada, tetapi dia ditolak. Ini yang menimbulkan pertanyaan yang ya ...ya, dari dua putusan yang terakhir. Kenapa begini, saya bisa pahami itu.

**36. KETUA: SUHARTOYO [28:07]**

Waktunya, Pak.

**37. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [28:08]**

Ya. Oke, Pak Yang Mulia.

Kemudian, oleh karena itu yang bagaimana kedudukan peraturan yang ada karena semuanya ditolak, maka PMK dengan krusial tidak ada putusan MK yang mencabut. Artinya Undang-Undang 10/2016 itu ndak satu pun yang dicabut, 22/2009 pun dia hanya menjelaskan, menafsirkan.

Kemudian, kedudukan pertimbangan itu saya lihat adalah ada dua teori yang kita lihat posisi pertimbangan, yaitu sebagai ratio decidendi atau dia adalah obiter dicta. Kalau ratio decidendi, dia harus bermuara pada putusan Pertimbangan itu akan diputuskan seiring. Kalau dia adalah obiter dicta, dia hanya umum dan kadang-kadang tidak terkait dengan penting ... dengan putusan, itu yang kita lihat.

Oleh karena itu, karena tidak satu pun yang dicabut oleh MK, karena ditolak semua, bagaimana kondisi peraturan perundang-undang kita sekarang? Pasal 161, Pasal 7N, itu tetap berlaku. Dia tidak dicabut walaupun MK mengatakan seperti ini, apa fungsi pertimbangan MK? Inilah kehebatan yang saya lihat dari putusan ini. MK menginginkan kepada pembentuk undang-undang, tolong perhatikan cara perhitungan seperti ini adalah tidak membedakan definitif dan terjabat sementara. Tidak membedakan ... dan dia harus factual (...)

**38. KETUA: SUHARTOYO [29:42]**

Baik, waktunya sudah habis, Bapak.

**39. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [29:42]**

Oke. Maaf, terima kasih, Yang Mulia.

**40. KETUA: SUHARTOYO [29:45]**

Ya, baik.

**41. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [29:45]**

Assalamualaikum wr.wb.

**42. KETUA: SUHARTOYO [29:49]**

Walaikumsalam. Dilanjut, Prof. Djohermansyah.

**43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [29:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum wr.wb.

**44. KETUA: SUHARTOYO [29:58]**

Walaikumsalam.

#### 45. **AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [29:59]**

Kami langsung, Yang Mulia. Bahwa sebagai orang yang juga berpengalaman dalam membuat undang-undang maupun melaksanakan undang-undang pemda dan pilkada, terlibat juga dalam pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil. Maka Ahli ingin menjelaskan bahwa yang pertama sekali, tradisi dalam pemilihan kepala daerah kita 5 tahun, dan kemudian limitnya 2 periode itu sudah berlangsung kurang lebih setengah abad 50 tahun, sejak adanya Undang-Undang Pemda 574 sampai sekarang Undang-Undang Pilkada yang terakhir.

Dan, Yang Mulia, jabatan itu sahnya dalam praktik selama 50 tahun ini adalah setelah pelantikan adanya SK pengangkatan saja tidak cukup. Ya, kenapa? Karena dalam tradisi kita dan praktik pemerintahan kita, pelantikan itu ada kesakralannya pengucapan sumpah dan janji dalam posisi jabatan. Kenapa kita menganut paham seperti itu, Yang Mulia? Karena kita memang masih menganut corak the old public administration, jadi tidak sama dengan paham the new public administration ala Amerika, misalnya seperti yang ketika ada kepala pemerintahan tewas atau berhalangan kemudian naik sang wakil dalam tempo waktu yang singkat.

Nah, kita tidak menganut corak seperti itu dalam aturan-aturan kita. Nah, Yang Mulia, Dalam tradisi kita juga dianut pola pengangkatan acting atau karteker. Dalam pola acting atau caretaker ini sumbernya ada dua, satu dari politisi yaitu wakil kepala daerah, yang kedua dari ASN atau pegawai negeri. Dan kedua berbeda sekali karakter dan jenisnya tidak bisa kita generalisasi. Nah, kami kemukakan ada paling kurang 5 macam model acting.

Satu, Plh waktunya singkat dipegang ASN dan dia adalah penjabat sementara. Lalu, yang kedua wakil melaksanakan tugas kepala daerah waktunya pendek dipegang oleh wakil kepala daerah dan dia bukan penjabat sementara. Lalu dia hanya wakil yang ter ... yang ketiban tambahan ... tambahan tugas sebagai kepala daerah.

Yang ketiga adalah Plt ini sama juga dia dipegang oleh wakil kepala daerah dan dia bukan penjabat sementara kepala daerah, tapi wakil kepala daerah definitif yang ketiban tugas tambahan.

Dan yang keempat, namanya penjabat sementara waktunya pendek dijabat oleh ASN dan dia adalah penjabat sementara seperti nomenklaturnya jelas penjabat sementara Pjs.

Yang terakhir adalah penjabat kepala daerah atau Pj kepala daerah. Nah, ini juga waktu relatif lama kalau yang sekarang selalu dijabat oleh penjabat struktural ASN dan dia adalah penjabat sementara dan saya pernah menjabat sebagai Pj ini.

Yang Mulia, maka dapat kita tegaskan bagi wakil yang menjadi Plt, ia bukan kepala daerah definitif dan bukan pula penjabat sementara yang notabene dari ASN. Ia adalah wakil yang mendapat beban tugas

tambahan. Jokesnya, Yang Mulia, ini kalau saya boleh sampaikan ia adalah penjabat yang bukan-bukan. Bukan pula penjabat sementara, bukan juga kepala daerah definitif.

Kami lanjutkan sedikit lagi, Yang Mulia, maka kalau terjadi kekosongan-kekosongan dalam jabatan, maka ada prosedur administrasi yang harus ditempuh lebih dahulu tidak otomatis. Nah, prosedur administrasi itu memakan waktu berbulan-bulan karena melibatkan DPRD, melibatkan pemerintah provinsi da ... sebagai wakil pusat, dan juga melibatkan pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Nah, dengan demikian maka dibaca dari praktik dan peraturan perundang-undangan kita, masa jabatan wakil yang diangkat menjadi kepala daerah dihitung mulai tanggal pelantikan jam yang bersangkutan, bukanlah dihitung dari mulai tanggal berhalangan sementara kepala daerah yang digantikannya. Masa jabatan wakil yang melaksana tugas acting kepala daerah karena kepala daerah definitifnya kena kasus hukum tidak bisa dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah. Karena ia nyata-nyata tetap sebagai wakil kepala daerah definitif yang ketiban tugas tambahan kepala daerah. Sebagai tugas wakil itu diatur di Undang-Undang Pemda Nomor 23 sesuai Pasal 66 ayat (1). Sebagai tugas kepala daerah diatur ... diatur pula di Undang-Undang Pemda sesuai dengan Pasal 65. Jadi, ini dipisahkan antara tugas wakil dengan tugas kepala daerah. Tugas wakilnya tetap masih dipegang ketika dia menjadi Plt dan plus tambahan tugas sebagai yang melaksana tugas kepala daerah.

Nah, terakhir, Yang Mulia, kalau dilihat dari kasus-kasus khususnya kasus Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menjadi Bupati definitif dapat kami katakan, kami simpulkan bahwa beliau dalam hal ini telah melaksanakan ... memegang jabatan dan itu berdasarkan terbitnya SK pengangkatannya dan lalu kemudian juga telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu pada 10 Mei 2019 ter ... terakhir masa jabatannya 17 Februari 2021, artinya yang bersangkutan memangku jabatan Bupati Bengkulu Selatan yang definitif selama 1 tahun, 9 bulan, 7 hari dan hitungan masa jabatan tersebutlah yang sudah sesuai menurut Ahli dengan regulasi pilkada kita dan regulasi Undang-Undang Pemda kita, Yang Mulia.

**46. KETUA: SUHARTOYO [36:45]**

Baik, cukup.

**47. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [36:46]**

Dan terakhir sekali, Yang Mulia, maka kami menyampaikan kiranya jabatan acting kepala daerah ini yang se ... wakil yang melaksan melaksanakan tugas ini gara-gara kepala daerah yang tersangkut

perkara hukum, maka hendaknya bisa dibaca bahwa wakil hitam di atas putih tetap wakil dan tidak benar-benar menjadi kepala daerah riil.

Demikian, Yang Mulia, mohon maaf kiranya bisa berguna keterangan Ahli ini bagi, Majelis, dalam memutuskan perkara ini seadil-adilnya. Assalamualaikum wr. wb.

**48. KETUA: SUHARTOYO [37:16]**

Walaikumsalam wr. wb.

Kuasa Hukum Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [37:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama kami akan menanyakan kepada Ahli Termohon yang mengkritisi Putusan MK seolah-olah tidak konsisten antara pertimbangan hukum dengan Petitum, begitu.

**50. KETUA: SUHARTOYO [37:44]**

Amar.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [37:44]**

Amar, mohon maaf. Mohon ... Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

**52. KETUA: SUHARTOYO [37:49]**

Atau Petitumnya Permohonan Pemohon? Satu-satu, ya, kalau bertanya cukup satu pertanyaan, Pak.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [37:56]**

Baik.

**54. KETUA: SUHARTOYO [37:56]**

Kalau ada (...)

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [37:57]**

Satu pertanyaan untuk Ahli Termohon dan satu pertanyaan untuk Ahli Pihak Terkait.

**56. KETUA: SUHARTOYO [38:05]**

Ya, silakan.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [38:06]**

Untuk Ahli Termohon kalau Amar Putusan Mahkamah menyatakan menolak Permohonan Pemohon, apakah dengan demikian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah tersebut tidak mempunyai nilai hukum? Sementara ternyata dalam praktik begitu banyak perubahan undang-undang, bahkan undang-undang baru lahir dari Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.

Untuk Ahli Pihak Terkait, Ahli Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan didasarkan atau sejak pelantikan atau definitif. Pertanyaan saya Ahli, bagaimana kalau ada pejabat, gubernur, bupati, atau wali kota yang memegang SK ... eh, memegang surat untuk melaksanakan tugas atau dia sebagai Plt gubernur, bupati, wali kota menandatangani produk-produk hukum daerah. Apakah itu menjadi tidak berlaku? Seperti contoh misalkan yang kami sampaikan dalam kasus in-concreto ini, Plt Bupati Bengkulu Selatan menandatangani 2 perda, 1 perbub. Bahkan 1 perbub dimaksud ditandatangani 9 hari sejak dia menjabat sebagai Plt (...)

**58. KETUA: SUHARTOYO [38:44]**

Ya, sudah, sudah. Sudah biar ditangkap pertanyaannya.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [38:48]**

Dan apakah kemudian ini tidak berlaku (...)

**60. KETUA: SUHARTOYO [38:48]**

Ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [38:48]**

Kalau dia masa ... izin, Yang Mulia, masa berlakunya sejak didefinitif. Terima kasih, Yang Mulia.

**62. KETUA: SUHARTOYO [39:53]**

Dari Termohon ada pertanyaan untuk Ahli?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [40:00]**

Sedikit, Yang Mulia. Ke Ahli Termohon.

**64. KETUA: SUHARTOYO [40:03]**

Termohon sendiri?

**65. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [40:04]**

Ya, Yang Mulia.

**66. KETUA: SUHARTOYO [40:04]**

Oke.

**67. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [40:04]**

Pendalaman karena waktunya terbatas tadi, Yang Mulia.

Mohon untuk Ahli menjelaskan hubungan antara bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, walikota dan wakil walikota. Sebenarnya seperti apa hubungan dan kedudukan masing-masing jabatan ini?

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**68. KETUA: SUHARTOYO [40:22]**

Baik.

Kemudian dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

**69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [40:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan ke Ahli dari Pemohon, Yang Mulia.

Ya, tadi Ahli sudah menyampaikan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129. Ya, di situ disebutkan pada halaman 68, itu masa jabatan yang dijalani secara nyata, riil, faktual. Nah, kemudian di alinea berikutnya, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan riil, faktual itu adalah semenjak wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota menggantikan kepala daerah yang berhenti. Nah, berhenti di sini kasus a quo semenjak ditangkap atau diberhentikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh Menteri Dalam Negeri.

Terima kasih, Yang Mulia.

**70. KETUA: SUHARTOYO [41:26]**

Baik. Dari Hakim, Yang Mulia? Silakan.

**71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Pak Ardilafiza, ya. Terima kasih keterangannya, Pak Dr. Ardi, juga Prof. Djohermansyah dan Pak Feri Amsari, ya. Ini ada 2 aliran, ya. Mungkin kalau saya katakan mazhab mungkin agak beda. Ada yang memahami Putusan MK itu antara amar dan pertimbangan itu satu kesatuan, tetapi ada yang membedakan. Kalau uraian tadi dari Pak Ardilafiza ini kan saya menangkap Bapak memisahkan antara amar dan pertimbangan hukum. Nah, ini ... ini bisa saya pahami karena ini memang di masyarakat seperti itu. Bahkan di antara Para Ahli, akademisi pun juga sama. Ini kan ada karakter yang berbeda Putusan MK dalam pengujian undang-undang yang berbeda dengan ... kalau dalam kasus-kasus perdata yang contentiosa, ya.

Nah, Putusan-Putusan MK ini kan dia erga omnes dan mengikat. Sehingga kalau dipisahkan, misalnya terakhir, ya. Pada waktu terkait Permohonan soal syarat calon presiden, ya ... oh sori ... syarat calon kepala daerah, itu amarnya Mahkamah menolak. Tapi pertimbangan hukumnya jelas di situ dinyatakan bahwa umur ... usia kepala daerah itu sejak ditetapkan oleh KPU. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya bahwa kalau hanya dilihat amar, lalu tanpa melihat pertimbangan, itu jiwanya justru mati, justru rohnya ada di situ, ya. Nah, ini saya ini sedikit memberi atau mungkin Pak Saudara Ahli punya pandangan lain, ya, karena memang kalau mengacu pada putusan-putusan perdata yang dijadikan pegangan kan adalah amarnya, ya. Nah ini sedikit, silakan mungkin kalau Pak Ardilafiza mau merespons silakan, karena ini kan sebenarnya sidang ini terbuka untuk umum.

Nanti setelah itu, terima kasih Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [45:30]**

Baik, Prof. Guntur ada?

**73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:31]**

Ada Yang Mulia.

**74. KETUA: SUHARTOYO [45:32]**

Silakan.

**75. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:33]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saya dul ... duluan dulu ke Pak Feri Amsari, kalau setelah Pak Feri Amsari memahaminya bahwa pejabat yang menggantikan itu secara faktual atau riil, berarti hitung-hitungannya konkretnya sudah menurut Pak Feri, berapa sudah berapa ini nih, 2 tahun pastinya kan, berapa ... 9 bulan, 7 hari.

Nah, baik. Sekarang saya ke Pak Ardilafiza. Tadi Pak Ardilafiza sepertinya masih mencoba untuk mengangkat putusan Mahkamah Konstitusi kemudian mendudukan, ya, pada konteks konsep yang sebagaimana dipahami oleh Pak Ardilafiza.

Nah kalau misalnya, tapi tadi di ujung terakhir tadi sempat menyatakan itu putusan Mahkamah secara faktual, riil, ya. Nah, kalau misalnya Pak Ardilafiza kemudian menghitungnya secara faktual, riil itu posisinya sudah berapa tahun? Kalau itu menghitungnya sebagaimana tadi yang Pak Ardilafiza sudah ka ... kemukakan di akhir tadi memberikan keterangan bahwa putusan Mahkamah itu mengarahkan ke faktual riil. Jadi berapa hitungannya Pak Ardilafiza sudah ada? Ya berapa? Bisa langsung saya catat dulu? Dijawab saja yang itu berapa tahun?

**76. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [46:23]**

Kalau kita bicara faktual, makanya bicara faktual riil itu, ini menimbulkan pertanyaan yang panjang.

**77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:29]**

Oh, panjang ini belum bisa langsung konkret gitu?

**78. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [46:31]**

Belum, belum. Ya, ya, oke, oke (...)

**79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZA [46:32]**

Oke baik, kalau gitu nanti dijelaskan kalau ... oke baik, berarti masih tanda tanya ya.

Oke, kemudian saya lanjut ke Prof. Djo, ya. Nah kalau Prof. Djo ini memang dari beberapa sebagai ahli masih pada posisi ya ada 5 jenis pejabat dan itu lebih menitikberatkan pada pelantikan. Tapi kan sudah dijelaskan pelantikan pertama itu memang pelantikan pada saat orang menjabat pertama itu memang hitungannya di pelantikan.

Tapi ketika ini di tengah jalan, nah inilah yang diisi oleh Mahkamah ini, ya. Seperti itu kira-kira gambarannya Pak Prof. Djo, ya. Nah, tetapi kalau seperti itu misalnya mengikuti alur pikirnya Prof. Djo itu ada juga angka tadi. Saya tadi dengar tapi saya belum catat persisnya gitu.

**80. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [47:29]**

Ada, Yang Mulia. Angkanya adalah kalau dihitung dari pelantikan pada 10 Mei 2019 sampai berakhir masa jabatannya 17 Februari 2021, yaitu 1 tahun 9 bulan 7 hari.

**81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:44]**

1 tahun 9 bulan 7 hari, ya.

**82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [47:46]**

Ya, betul.

**83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:47]**

Oke saya catat dulu. Oke baik saya kira itu yang menjadi di anu ... kita ini diskursus perdebatan kita. Tapi nanti Mahkamah tentu dengan kriteria yang sudah Mahkamah putuskan dan tentu nanti akan meletakkan itu secara ... apa ... konsisten. Saya kira saya itu, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia, Pak Ketua.

**84. KETUA: SUHARTOYO [48:08]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Pak Feri, silakan dijawab.

**85. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [48:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat penting. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa soal putusan yang disadur oleh Kuasa Pihak Terkait, perlu dilengkapi bahwa putusan itu tidak sekedar menyebutkan merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, riil, atau faktual. Tapi ada kalimat yang sangat penting, yaitu *dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan*. Jadi, cara menghitungnya tidak sekedar menghitung kalau dia dilantik definitif atau tidak. Itu sebabnya kalau kita berbasis kepada tiga peraturan yang berkaitan, Surat Edaran

BKN 2 ... Nomor 2/2019, Permendagri 74/2016, dan Permendagri 1/2018, kita bisa memahami bahwa perbedaan Plh, Plt, Pjs, dan Pj, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya itu dihitung, ya. Tidak dihitung hanya sekedar ketika dia dilantik. Itu sebabnya, Yang Mulia, terjadi perbedaan penghitungan, misalnya Termohon di dalam permo ... Termohon dalam jawabannya menjelaskan soal yang berkaitan sudah pernah menjabat selama 1 tahun 9 bulan 14 hari. Sementara Pihak Terkait menjelaskan sudah pernah menjabat 1 tahun 9 bulan 7 hari. Kenapa penghitungan berbeda? Karena semua pihak yang berbeda itu menghitung dari ketika dilantik definitif. Sementara yang menjadi pelaksana tugas dan lain-lain tidak dihitung. Padahal di dalam putusan Mahkamah sangat eksplisit bahwa yang tidak dilantik pun dihitung. Ada dua jenis jabatan yang tidak dilantik, Plh dan Plt, padahal itu menurut Mahkamah tentu saja dihitung.

Ada gambaran dari pertanyaan Kuasa tadi, bagaimana seseorang kalau ditangkap, ya, apakah dia berhenti seketika? Ada dua pendekatan cara menilainya yang berkaitan dengan perkara a quo.

Satu. Orang yang ditangkap tidak serta-merta diberhentikan sampai status hukum tetap. Karena hak baginya untuk membela diri, gitu, ya. Tetapi Plt atau Pj yang dilantik, misalnya Pjs yang dilantik karena berhalangan tetap itu sudah terhitung. Kenapa dihitung? Karena ada kekuasaan yang melekat pada dirinya, walaupun sebagian Pjs dan Plt tidak sekuat pejabat yang dipilih. Tetapi itulah yang menjadi dasar landasan putusan Mahkamah bahwa penghitungan berdasarkan power yang dia miliki, bukan dilantik atau tidak dilantik. Dan ini menjadi sebuah ketentuan penghitungan dimana-mana termasuk beberapa perkara yang sudah disidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi, meskipun dia adalah pejabat yang bukan-bukan, tetapi dia bisa menunda orang naik pangkat dan lain-lain, Prof.

Nah, kedua saya perlu juga karena ini berkaitan dengan penjelasan soal putusan-putusan yang saya sampaikan, di mana saja di dalam proses ber hukum di pengadilan, pertimbangan Mahkamah atau peradilan itu adalah bagian satu kesatuan dari putusan. Saya tidak pernah melihat ada perdebatan di negara-negara yang punya hukum maju, Yang Mulia. Perdebatan mengenai apakah pertimbangan itu bukan bagian dari putusan atau tidak. Semuanya mengatakan pertimbangan dan itu bahkan dibahas apa legal reasoning hakim. Sehingga lahir lah amar. Apakah pertimbangan itu punya kaitan atau tidak dengan Amar? Apakah indah atau tidak pertimbangan itu? Apakah pertimbangan itu menjadi masterpiece yang dibicarakan dalam berbagai peristiwa hukum? Jadi, pertimbangan maha penting dan dia tidak bisa dipisahkan dari amar putusan. Bahkan pertimbangan wajib dilaksanakan kalau sifatnya memerintahkan bahkan dalam konteks Mahkamah memberikan makna konstitusional atau tidak konstitusional.

Saya pikir itu respons saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**86. KETUA: SUHARTOYO [53:11]**

Baik. Terima kasih. Pak Ardi, silakan.

**87. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [53:13]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Makhfud dan Para Pemohon. Saya akan jawab pertanyaan Pak Makhfud itu bareng dengan yang disampaikan oleh Prof. Guntur biar spare waktunya agak jauh cepat gitu.

**88. KETUA: SUHARTOYO [53:24]**

Ya, silakan.

**89. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [53:24]**

Yang pertama adalah bahwa putusan yang berdampak terhadap peraturan perundang-undangan dalam judicial review adalah ada putusan di dalam amarnya mencabut atau dikatakan conditionally constitutional atau dimaknai lain. Sehingga apa yang kita lihat, undang-undang yang diuji itu berubah maknanya, berubah normanya, atau dicabut normanya. Itu ada di dalam amar putusan. Tetapi dalam konteks ini dari tiga putusan yang kita lihat, di amarnya semuanya adalah ditolak. Tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang dicabut, dan tidak ada yang dimaknai lain daripada apa yang ada dalam undang-undang itu. Sehingga dampaknya bagaimana? Ini yang jadi persoalan di kita.

Sebetulnya secara teori kalau kita ngajar di kelas memang kita mengatakan mulai dari permohonan sampai dengan amar itu adalah merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Tidak bisa dipisahkan. Makanya saya mencoba memaknai apa makna dari pertimbangan itu. Adalah pertimbangan itu untuk mengingatkan pada pembentuk undang-undang karena ranah yang seperti ini adalah ranah administrasi negara. Karena Plt itu adalah ranah administrasi negara. MK dengan sadar tidak masuk ke situ karena itu bukan bicara tentang konstitusional, itu pertimbangan MK yang saya sampaikan tadi.

Nah itu yang terjadi karena tidak ada satu pun yang dicabut, bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan? Nggak berubah dia. Undang-Undang 10, 7, Pasal 7 dan Pasal 162 itu masih tetap berlaku? Berlangsung. Kalau pertimbangan tadi, ya tetap jadi pertimbangan posisinya dan tapi tidak terkait dengan putusan itu, ternyata seperti itu. Salahkah KPU menerbitkan KP ... PKPU Pasal 19 ayat ... huruf e itu bahwa dia mengatakan pelantikan karena pasal undang-undang itu belum diubah sama sekali, itu yang jadi persoalannya. Kita tidak bicara tentang

bagaimana seharusnya, kalau seharusnya lain. Kalau saya mengatakan seharusnya setelah seseorang dinyatakan ter ... terdakwa, maka dia harus mundur, KPK seperti itu. Tapi norma kita tidak seperti itu. Itu yang persoalannya secara normatif, gitu, itu yang kita lihat. Jadi, apa dampak dari kalau kita gunakan pertimbangan itu sebagai da ... sebagai putusan bahwa faktual itu bagaimana mengukurnya? Kenapa? Karena Plt itu di dalam satu masa jabatan itu bisa berulang 2 atau 3 kali.

**90. KETUA: SUHARTOYO [56:41]**

Ya. Sudah ada tambahan, Pak?

**91. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [56:41]**

Ya.

**92. KETUA: SUHARTOYO [56:44]**

Sudah cukup, sudah jelas.

**93. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [56:44]**

Oh, sudah jelas.

**94. KETUA: SUHARTOYO [56:45]**

Masih ada lagi?

**95. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [56:47]**

Masih ada lagi, Pak, Yang Mulia (...)

**96. KETUA: SUHARTOYO [56:49]**

Ya, diringkas, Pak.

**97. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [56:49]**

Jadi, bisa ... dia bisa berulang 2 atau 3 kali. Jadi, bagaimana menghitungnya? Karena dia naik haji, karena dia terdakwa, atau karena dia diperiksa, terpaksa dia berulang. Apakah itu dihitung? Itu jadi persoalan kita di dalam ... dalam kenyataannya.

Yang kedua adalah masalah dari apa yang ditanyakan oleh Po ... Termohon sendiri adalah bagaimana sih kita melihat hubungan antara bupati dengan wakil bupati? Wakil itu secara konstitusional tidak kita

temukan. Pasal 18 ayat (4) itu hanya mengatakan adalah gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan. Dia muncul di dalam undang-undang sedemikian rupa di dalam Undang-Undang 23. Yang tadi dikatakan dari Undang-Undang 574 pun juga sudah ada. Bagaimana hubungannya? Maka di ... orang selalu bertanya apa sih posisinya? Posisinya menggantikan bupati kalau dia tidak ... sudah ... sudah tidak me ... melaksanakan tugas, berhalangan tetap.

**98. KETUA: SUHARTOYO [57:45]**

Ya.

**99. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [57:45]**

Itu yang kita lihat.

**100. KETUA: SUHARTOYO [57:47]**

Cukup, ya, Pak ya.

**101. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [57:49]**

Nah, ya.

**102. KETUA: SUHARTOYO [57:49]**

Cukup, ya?

**103. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [57:51]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**104. KETUA: SUHARTOYO [57:51]**

Baik.

**105. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [57:51]**

Oke.

**106. KETUA: SUHARTOYO [57:52]**

Dari Pak ... Prof. Djohermansyah.

**107. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [57:56]**

Baik, Yang Mulia.

Saya langsung saja kepada pengacara Pemohon tadi, soal wakil yang menjabat sebagai atau memegang posisi Plt juga ya, dari bupati, lalu menandatangani produk hukum daerah seperti perda tadi. Apakah perda itu tidak berlaku? Gitu, ya (...)

**108. KETUA: SUHARTOYO [57:56]**

Sah atau tidak?

**109. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [58:16]**

Nah. Jadi saya bisa katakan perda tersebut yang ditandatangani tetap berlaku. Kenapa? Karena Pasal 65 ayat (1) dia pegang sebagai wakil, dia melaksanakan tugas wakil. Kemudian ketika dia dapat tugas tambahan sebagai yang melaksanakan tugas kepala daerah, ini aturan mainnya di Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Pemda 23/2014. Maka dia salah satu perintah di Undang-Undang itu, Pasal 66 ayat (1) itu, kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan tanda tangan-tanda tangan. Jadi dengan demikian, maka tidak ... tidak persoalan, tetap dia (...)

**110. KETUA: SUHARTOYO [59:02]**

Tetap mengikat sah ya, Pak ya?

**111. AHLI DARI PIHAK TERKAIT:DJOHERMANSYAH DJOHAN [59:02]**

Ya. Tetap sah dan berlaku, ya, apa yang dilakukan oleh wakil yang jadi Plt itu plus tugas tambahan. Kalau tidak, berhenti pemerintahan. No vacuum of power, pemerintahan tidak boleh berhenti.

**112. KETUA: SUHARTOYO [59:23]**

Ya.

**113. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DJOHERMANSYAH DJOHAN [59:27]**

Jadi kalau dia tidak boleh taken, Yang Mulia, pemerintahan berhenti. Terima kasih.

**114. KETUA: SUHARTOYO [59:32]**

Baik. Ini keterangan Sak ... Ahli sudah cukup.

Tapi saya satu pertanyaan untuk Pak Ardi, ya. Begini, tadi Bapak kan me-exercise kalau bagaimana dengan pejabat bupati ketika cuti atau berhalangan sementara ... apa ... umroh, atau nah itu. Bukannya Putusan MK itu dalam konteks mengisi kekosongan itu?

**115. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [59:59]**

Ya.

**116. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]**

Artinya ... atau mungkin Bapak bisa tunjukkan ke persidangan ini, di mana diatur baik di Undang-Undang 23/2014 maupun Undang-Undang 10/2016 yang mengatur berkaitan dengan pejabat bupati, gubernur, maupun wali kota yang berhenti di tengah jalan (...)

**117. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:00:30]**

Ya.

**118. KETUA: SUHARTOYO [01:00:31]**

Untuk menghitung ... cara menghitung periodisasinya jika dikaitkan dengan Pasal 7 huruf n itu? Di sana ditentukan syaratnya harus tidak boleh melebihi untuk menjadi calon itu 2 periode. Kalau yang diatur di undang-undang ... 2 undang-undang tadi yang saya sebutkan, 23/2014 dan 10/2016 klir itu untuk jabatan yang dimulai dari nol, untuk jabatan 5 tahun dihitung sejak pelantikan. Nah, bagaimana dengan orang yang menggantikan, melaksanakan tugas menggantikan bupati, gubernurnya, atau wali kotanya yang kemudian dia sendiri ketika sudah menunaikan itu ingin mencalonkan, Pak? Bagaimana menghadapkan dengan kebutuhan Pasal 7 huruf n itu?

**119. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:01:26]**

Ya.

**120. KETUA: SUHARTOYO [01:01:27]**

Kalau tidak ada Putusan MK ini. Atau mungkin Bapak bisa menunjukkan ke kami diatur di mana itu, Pak? Silakan.

**121. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:01:34]**

Ini ujian tesis nih, Pak. Ujian disertasi nampaknya ini.

**122. KETUA: SUHARTOYO [01:01:38]**

Itu, Pak, jadi (...)

**123. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:01:39]**

Ya.

**124. KETUA: SUHARTOYO [01:01:39]**

Ya.

**125. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:01:41]**

Sudah? Terima kasih, Yang Mulia.

Di dalam ... tadi saya yang mengatakan bahwa di dalam masa jabatan 5 tahun itu dimungkinkan bupati itu akan berhalangan sementara itu berulang-ulang, pas bisa. Karena mungkin sekarang ... sekarang dia ditahan karena terjebak[sic!] tapi terbukti dia tidak salah, dikembalikan lagi. Kemudian dia naik haji, hilang 40 hari, dia di ... segala macam. Jadi, apakah ... gimana menghitungnya?

Maka oleh karena itu, di dalam undang-undang ini sudah dikatakan ukurannya adalah punya kepastian sejak pelantikan, jadi bukan Plt dihitung. Kenapa? Plt itu sebetulnya dia mengerjakan tugas, pimpinannya masih ada. Dia boleh marah kalau salah putusannya, kebijakannya. Ditelepon dari ... dari ... dari Mekkah. Oh, ya enggak begitu putusannya, kebijakannya. Boleh dia seperti itu.

**126. KETUA: SUHARTOYO [01:02:40]**

Jadi, Bapak bisa tunjukkan ke kami di mana aturan itu?

**127. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:02:42]**

Ya, kan dikatakan di dalam Pasal 162 itu, kan dikatakan mulai dari pelantikan, Yang Mulia.

**128. KETUA: SUHARTOYO [01:02:46]**

Itu untuk yang jabatan utuh, Bapak.

**129. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:02:48]**

Ya.

**130. KETUA: SUHARTOYO [01:02:49]**

Ini yang tidak utuh, yang berhenti di jalan.

**131. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:02:51]**

Oh, kalau yang tidak utuh enggak ada ... ndak ada, Yang Mulia.

**132. KETUA: SUHARTOYO [01:02:52]**

Nah, itu. Itulah kekosongan rechtsvacuum itu diisi oleh Putusan MK itu. Jadi ini juga kembali lagi ke diskusi soal, ini kok tidak diamarkan, di ... hanya di pertimbangan?

**133. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:07]**

Ya.

**134. KETUA: SUHARTOYO [01:03:10]**

Itu ... itu perdebatan lain, kan?

**135. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:09]**

Ya.

**136. KETUA: SUHARTOYO [01:03:10]**

Tapi substansi itu kan dibutuhkan untuk menjemput kebutuhan Pasal 7 huruf n itu, Pak.

**137. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:16]**

Ya, Yang Mulia.

**138. KETUA: SUHARTOYO [01:03:17]**

Ya sudah, ya, Pak ya.

**139. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:17]**

Jadi ... jadi memang rumit, ya.

**140. KETUA: SUHARTOYO [01:03:21]**

Ya, ya sudah.

**141. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:22]**

Kenapa? Karena Pasal 7N itu kata ... di pasal itu kan hanya kata-kata pelantikan, apakah dia menjabat atau tidak.

**142. KETUA: SUHARTOYO [01:03:29]**

Bukan. 7N itu 2 periode itu, Pak. Tidak (...)

**143. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:32]**

Ya, 2 periode ... 2 periode itu perhitungannya sudah jelas di dalam Putusan MK itu menjabat 2,5 tahun.

**144. KETUA: SUHARTOYO [01:03:37]**

Ya.

**145. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:38]**

Itu yang jadi ... persoalannya adalah karena berhenti di tengah jalan ini saja, itu yang persoalannya.

**146. KETUA: SUHARTOYO [01:03:42]**

Baik, ya.

**147. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:42]**

Tetapi dalam kalimat itu pasti tetap dikatakan setelah pelantikan, hitungannya seperti itu.

**148. KETUA: SUHARTOYO [01:03:47]**

Ya.

**149. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:47]**

Karena kalau faktual itu, itu enggak ada punya kepastian nanti.

**150. KETUA: SUHARTOYO [01:03:51]**

Ya, ya.

**151. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:03:53]**

KPU-nya punya (...)

**152. KETUA: SUHARTOYO [01:03:53]**

Ya, bisa jadi yang pelantikan itu yang tidak ada kepastian.

Lho, begini, Pak. Ada orang menjabat, ini untuk menjem ... untuk sebenarnya untuk menjawab itu, orang kemudian ditunjuk sebagai Plt. Sudah 6 bulan, 8 bulan, dia ingin Plt terus, ketika sudah di akhir-akhir minta dikeluarkan SK supaya dilantik. Karena apa? Argo yang sudah jalan berbulan-bulan itu tidak dihitung, ketika kemudian dijadikan cara tuk ... untuk Pasal 7 ayat (2) huruf n, huruf n, itu, Pak. Ini modus juga, makanya MK sampai sedetail itu di dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan ... apa ... konstusionalitas norma itu. Itu Pak, jadi itu ... ini juga ... juga persoalan juga.

**153. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:04:46]**

Tapi saya ... bahwa putusan itu, kan tidak pernah menyatakan batal atau dicabutnya (...)

**154. KETUA: SUHARTOYO [01:04:53]**

Ya. Itu, itu (...)

**155. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:04:54]**

Nah, itu yang dipersoalkan.

**156. KETUA: SUHARTOYO [01:04:55]**

Sudah.

**157. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:04:56]**

Itu yang persoalannya.

**158. KETUA: SUHARTOYO [01:04:56]**

Sudah, Pak. Bapak Sudah (...)

**159. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:04:56]**

PKPU (...)

**160. KETUA: SUHARTOYO [01:04:56]**

Berulang-ulang kalo itu.

**161. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:04:57]**

Membuat PKPU itu salah.

**162. KETUA: SUHARTOYO [01:04:59]**

Ya.

**163. AHLI DARI TERMOHON: ARDILAFIZA [01:05:00]**

Betul, tidak? Karena dia dasarnya seperti itu.

**164. KETUA: SUHARTOYO [01:05:01]**

Ya, oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.

Dan semuanya kepada Para Ahli, bukan kami akan berpendapat seperti itu tetapi ini bicara yang normatif saja. Kami enggak boleh kemudian mengemukakan suatu pernyataan yang ada keberpihakan hanya sekedar ... apa ... diskusi yang tidak dalam kono ... apa ... konotasi untuk berpendapat.

Terima kasih untuk Pak Feri, Pak Ardi, dan Pak Prof. Djohermansyah. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk kami, dalam pengambilan Putusan di Mahkamah, boleh meninggalkan tempat. Mari, Prof, mari, Bapak.

Sekarang Pak Edy Junaidi, mau menjelaskan apa ini di persidangan?

**165. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:08]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya saat kejadian Pak Bupati Bengkulu Selatan, saat itu Pak Dirwan Mahmud (...)

**166. KETUA: SUHARTOYO [01:06:26]**

Kapan itu, Pak, kejadiannya?

**167. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:28]**

Tanggal ... apa ... bulan ... tang ... 15 Mei 2018.

**168. KETUA: SUHARTOYO [01:06:35]**

15 Mei?

**169. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:36]**

Ya, 15 Mei 2018.

**170. KETUA: SUHARTOYO [01:06:37]**

18. Ada kejadian apa itu?

**171. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:39]**

Ya. Ditangkap oleh KPK, Pak.

**172. KETUA: SUHARTOYO [01:06:41]**

Ditangkap oleh KPK.

**173. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:42]**

Ya.

**174. KETUA: SUHARTOYO [01:06:43]**

Waktu ini beliau bupati, ya?

**175. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:45]**

Ya. Bupati, Pak.

**176. KETUA: SUHARTOYO [01:06:46]**

Dia menjabat Bupati sejak kapan, Pak?

**177. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:50]**

Oh, enggak hafal saya. Kalau menjabat bupatinya enggak hafal saya, Pak, sejak kapannya.

**178. KETUA: SUHARTOYO [01:06:55]**

Dilantiknya sejak kapan?

**179. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:56]**

Ya.

**180. KETUA: SUHARTOYO [01:06:56]**

Tidak tahu?

**181. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:57]**

Enggak hafal ... enggak hafal saya.

**182. KETUA: SUHARTOYO [01:06:58]**

Saudara waktu itu jadi apa?

**183. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:06:59]**

Kepala bagian pemerintahan, di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

**184. KETUA: SUHARTOYO [01:07:03]**

Oh. Masih ... oh di Provinsi?

**185. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:05]**

Ya, di Provinsi saya.

**186. KETUA: SUHARTOYO [01:07:06]**

Bukan di Bengkulu Selatan?

**187. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:06]**

Bukan, Pak.

**188. KETUA: SUHARTOYO [01:07:08]**

Belum pensiun, ya?

**189. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:09]**

Saat ini belum. Belum pensiun, Yang Mulia.

**190. KETUA: SUHARTOYO [01:07:12]**

Saat itu? Sekarang juga belum?

**191. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:14]**

Juga belum, Yang Mulia.

**192. KETUA: SUHARTOYO [01:07:15]**

Oh.

**193. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:16]**

Saya belum.

**194. KETUA: SUHARTOYO [01:07:17]**

Belum, ini Bapak kan masih PNS.

**195. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:21]**

Ya, ya.

**196. KETUA: SUHARTOYO [01:07:22]**

Bagaimana jadi Saksi berpihak begini, boleh enggak sama ... sumpah Bapak, sebagai PNS?

**197. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:29]**

Nah, saya terus saja dihubungi katanya untuk menjadi ... menyampaikan ini (...)

**198. KETUA: SUHARTOYO [01:07:35]**

Ya.

**199. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:36]**

He eh. Saya juga (...)

**200. KETUA: SUHARTOYO [01:07:37]**

Ini kan perkara yang sifatnya (...)

**201. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:39]**

He eh.

**202. KETUA: SUHARTOYO [01:07:39]**

Antar Pihak ini.

**203. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:40]**

Ya. Saya sebetulnya tidak berpihak ini, Pak, kalau menurut saya, Yang Mulia.

**204. KETUA: SUHARTOYO [01:07:43]**

He em. Ya, ya.

**205. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:45]**

He eh. Saya ingin menyampaikan saja (...)

**206. KETUA: SUHARTOYO [01:07:45]**

Kalau tidak berpihak, Bapak di tengah sini.

**207. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:47]**

Oh. Begitu, ya.

**208. KETUA: SUHARTOYO [01:07:47]**

Begitu Bapak duduknya, saya sudah berpihak.

**209. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:49]**

Oh. Gitu, ya.

**210. KETUA: SUHARTOYO [01:07:50]**

Bagaimana tidak berpihak?

**211. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:50]**

Ya, ini ... ini kekurangan pemahaman saya berarti, Yang Mulia.

**212. KETUA: SUHARTOYO [01:07:53]**

Ya, nanti kami nilai. Tapi (...)

**213. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:55]**

Ya.

**214. KETUA: SUHARTOYO [01:07:56]**

Begitu kami menganggap berpihak, Bapak kami sampingkan.

**215. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:07:58]**

Siap, siap.

**216. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]**

ke... anu ... keterangannya. Gimana?

**217. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:08:04]**

Saya juga ini mendapat perintah dari atasan saya untuk apa ... menghadiri ini, karena untuk menyampaikan keadaan saat itu.

**218. KETUA: SUHARTOYO [01:08:11]**

Ada, ada izin atau perintah?

**219. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:08:12]**

Ada izin, izin terus saya diperintah sama atasan saya, saya dengan ada izin itu saya menghadap ke atasan saya (...)

**220. KETUA: SUHARTOYO [01:08:17]**

Ya, nanti kalau ada sudah berpihak kami akan kesampaikan.

**221. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:08:20]**

Siap, siap, siap, siap, Yang Mulia.

**222. KETUA: SUHARTOYO [01:08:22]**

Apa lagi? Silakan.

**223. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:08:23]**

Jadi saat itu saya dipanggil apa ... pimpinan saya, saat itu sekretaris daerah karena gubernur ada kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan kejadian ini agar tidak terjadi kekosongan, kekosongan apa ... jabatan saat itu kita mengingatkan berbuat surat kepada wakil bupati saat itu (...)

**224. KETUA: SUHARTOYO [01:08:48]**

Ya.

**225. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:08:48]**

Bengkulu Selatan, supaya melaksanakan tugas selaku ... melaksanakan tugas-tugas bupati.

**226. KETUA: SUHARTOYO [01:08:55]**

Ya.

**227. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:08:56]**

Kita cuma menyampaikan, mengingatkan ada ketentuan Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**228. KETUA: SUHARTOYO [01:09:08]**

Yang buktinya nomor berapa, Pak Kuasa Hukum?

**229. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:09:18]**

Bukti P-6, Yang Mulia.

**230. KETUA: SUHARTOYO [01:09:19]**

P-6, ya?

**231. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:09:20]**

Ya.

**232. KETUA: SUHARTOYO [01:09:27]**

Oke. Jadi begitu Pak Dirwan Mahmud ditahan, keluarkan surat penunjukan wakil bupati, ya?

**233. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:09:38]**

Ya, Pak.

**234. KETUA: SUHARTOYO [01:09:38]**

Sebagai apa?

**235. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:09:39]**

Untuk melaksanakan tugas-tugas bupati.

**236. KETUA: SUHARTOYO [01:09:41]**

Oh, melaksanakan tugas bupati.

**237. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:09:42]**

Ya, he eh.

**238. KETUA: SUHARTOYO [01:09:43]**

Itu di 17 Mei 2018, ya?

**239. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:09:47]**

Betul, Pak Yang Mulia.

**240. KETUA: SUHARTOYO [01:09:51]**

Terus apa lagi yang mau diceritakan?

**241. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:09:52]**

Ya. saya cuma ... apa ... menyampaikan itu bahwa gubernur saat itu melaksanakan tugasnya, selaku ... mensupervisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah (...)

**242. KETUA: SUHARTOYO [01:10:04]**

Ada tidak kemudian pengusulan-pengusulan ke Mendagri? Pengusulan penggantinya atau (...)

**243. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:10:12]**

Oh, ya itu (...)

**244. KETUA: SUHARTOYO [01:10:12]**

Supaya wakilnya diangkat jadi apa, ditetapkan sebagai bupati yang definitif, menggantikan Pak bupati yang berhalangan tetap ini (...)

**245. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:10:22]**

Ya, setelah itu saya ingat saya, setelah ada usulan dari Dewan Perwakilan Daerah pro ... Kabupaten Bungku Selatan, ya, gubernur meneruskannya kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan.

**246. KETUA: SUHARTOYO [01:10:35]**

Ada surat dari Mendagri yang merespon?

**247. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:10:38]**

Kalau untuk pengusulan itu, saya juga enggak ingat kalau untuk pengusulannya (...)

**248. KETUA: SUHARTOYO [01:10:45]**

Ya sudah, jangan kalau (...)

**249. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:10:46]**

He eh.

**250. KETUA: SUHARTOYO [01:10:47]**

Tidak ingat jangan Bapak ngarang-ngarang, nantinya.

**251. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:10:49]**

Ya, ya siap.

**252. KETUA: SUHARTOYO [01:10:50]**

Itu saja, Pak?

**253. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:10:51]**

Baik, Pak, sementara itu. Terima kasih.

**254. KETUA: SUHARTOYO [01:10:54]**

Baik, jadi tidak ada surat lain lagi yang dikeluarkan gubernur berkaitan dengan Pak Dirwan Mahmud?

**255. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:11:00]**

Tidak ada Pak, satu itu saja.

**256. KETUA: SUHARTOYO [01:11:05]**

Tidak ada.

**257. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:11:05]**

Ya.

**258. KETUA: SUHARTOYO [01:11:11]**

Pak Habi Burahman, mau menyampaikan apa ini? PNS juga ini? PNS juga di (...)

**259. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:11:17]**

Bukan, Pak.

**260. KETUA: SUHARTOYO [01:11:20]**

Bukan?

**261. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:11:20]**

Bukan, Pak.

**262. KETUA: SUHARTOYO [01:11:21]**

Oke. Silakan, Pak.

**263. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:11:23]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini saya mau menyampaikan, Yang Mulia, kita waktu ... waktu ada KPU membuka masukan, tahapan ini, Pak Yang Mulia.

**264. KETUA: SUHARTOYO [01:11:43]**

Masukan tanggapan masyarakat? (...)

**265. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:11:45]**

Tanggapan masyarakat.

**266. KETUA: SUHARTOYO [01:11:45]**

Apa itu?

**267. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:11:46]**

Jadi kita mengajukan tanggapan masyarakat terkait (...)

**268. KETUA: SUHARTOYO [01:11:50]**

Bukti berapa, Pak?

**269. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD: [01:11:54]**

P-9 dan P-10, Yang Mulia.

**270. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]**

Jadi Saksi yang kemudian mengajukan tanggapan?

**271. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:00]**

Ya, Pak.

**272. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]**

Masih renis waktunya, tenggang waktunya masih?

**273. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:04]**

Pas itu, Pak. Waktunya, Pak, tanggal 15 (....)

**274. KETUA: SUHARTOYO [01:12:04]**

Pas.

**275. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:04]**

Pak.

**276. KETUA: SUHARTOYO [01:12:04]**

Belum terlambat?

**277. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:07]**

Belum, Pak.

**278. KETUA: SUHARTOYO [01:12:09]**

Ke siapa, Bapak ajukan?

**279. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:10]**

Ke KPU, Pak.

**280. KETUA: SUHARTOYO [01:12:11]**

KPU?

**281. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:13]**

Ya.

**282. KETUA: SUHARTOYO [01:12:13]**

Enggak ke Bawaslu?

**283. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:14]**

Enggak, Pak. Karena tahapannya di KPU, Pak, Yang Mulia.

**284. KETUA: SUHARTOYO [01:12:18]**

Siapa yang menerima pengaduan, Bapak?

**285. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:21]**

Waktu itu, Pak Komisioner, Pak.

**286. KETUA: SUHARTOYO [01:12:24]**

Pak siapa?

**287. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:24]**

Yang Mulia.

**288. KETUA: SUHARTOYO [01:12:26]**

Komisionernya kan banyak.

**289. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:28]**

Pak gus ... Gusnan.

**290. KETUA: SUHARTOYO [01:12:30]**

Pak Gusman?

**291. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:31]**

Ya.

**292. KETUA: SUHARTOYO [01:12:38]**

Bapak, memangnya sebagai apa?

**293. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:38]**

Warga, Pak, warga (...)

**294. KETUA: SUHARTOYO [01:12:43]**

Melapor-lapor begitu. Warga, ya?

**295. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:48]**

Ya, Pak.

**296. KETUA: SUHARTOYO [01:12:46]**

Tapi, Bapak mengutip Putusan-Putusan MK barang sini lho. Ada yang ngajari jangan-jangan, tidak?

**297. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:12:52]**

Enggak ada, Pak. Awalnya kita ngambil di media, Pak, waktu itu.

**298. KETUA: SUHARTOYO [01:13:01]**

Kok tau ini ada cara menghitung periodisasi, barang ini kan luar biasa ini.

**299. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:13:05]**

Namanya warga negara, Pak.

**300. KETUA: SUHARTOYO [01:13:08]**

Ya, ya, itu kami perlu tahu karena untuk menilai kemurnian kesaksian, Bapak itu.

**301. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:13:17]**

Ya, ya, Yang Mulia.

**302. KETUA: SUHARTOYO [01:13:17]**

Ya, kan? Bapak, disini mohon maaf, ya, buruh harian lepas kan kalau buat pengaduan seperti ini kan sudah seperti dosen ini. Sudah mencantumkan Putusan-Putusan MK, sudah. Tapi, ya, kita enggak boleh underestimate tapi kalau, Bapak memang murni dari bukan karena ada yang itu, ya. Terus gimana ceritanya, Pak? Direspon oleh Pak Gusnan, ya?

**303. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:13:47]**

Ya.

**304. KETUA: SUHARTOYO [01:13:48]**

Diterima langsung?

**305. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:13:49]**

Diterima langsung, Yang Mulia.

**306. KETUA: SUHARTOYO [01:13:49]**

Langsung ada tanda terimanya, Pak?

**307. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:13:52]**

Ada, Pak.

**308. KETUA: SUHARTOYO [01:13:56]**

Oke, terus bagaimana perkembangan selanjutnya setelah dilaporkan itu?

**309. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:14:01]**

Saya laporkan, Pak, waktu itu pada tanggal 15 September. Nah, sebelum penetapan pada tanggal 22 itu, tanggal 21 nya saya belum menerima, Pak, tang ... tanggapan saya ini, Pak.

**310. KETUA: SUHARTOYO [01:14:07]**

Ya.

**311. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:14:07]**

Oleh KPU.  
Kami datang lagi ke KPU, Pak, Yang Mulia.

**312. KETUA: SUHARTOYO [01:14:20]**

Terus?

**313. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:14:22]**

Lalu ditanyain baru dapat surat, Yang Mulia. Suratnya tertanggal-tanggal 17 untuk jawaban tanggapan masyarakat.

**314. KETUA: SUHARTOYO [01:14:29]**

Bukti berapa, Pak? P berapa?

**315. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:14:38]**

P-11, Yang Mulia.

**316. KETUA: SUHARTOYO [01:14:38]**

P-11.  
Apa surat itu menurut, Pak?

**317. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:14:45]**

Suratnya (...)

**318. KETUA: SUHARTOYO [01:14:45]**

Habi Burahman.

**319. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:14:45]**

Ini, Yang Mulia, suratnya menyatakan bahwa KPU hanya menjalankan PKPU yang dibuat oleh KPU-RI.

**320. KETUA: SUHARTOYO [01:14:58]**

Oh.

**321. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:14:58]**

Ya.

**322. KETUA: SUHARTOYO [01:14:58]**

Tidak menjawab substansinya, ya?

**323. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:00]**

Ya.

**324. KETUA: SUHARTOYO [01:15:01]**

Hanya (...)

**325. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:01]**

Yang jadinya ada, ada juga kejadiannya, Yang Mulia.

**326. KETUA: SUHARTOYO [01:15:01]**

Apa?

**327. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:06]**

Tanggal 21 itu kita datangnya siang. Dia itu so ... paginya ceritanya ini tapi ada kita bisa melihat waktu itu. Dia melakukan klarifikasi kepada Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi tersebut, Yang mulia.

**328. KETUA: SUHARTOYO [01:15:25]**

Oh, KPU sudah?

**329. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:27]**

Ya, pada tanggal 21.

**330. KETUA: SUHARTOYO [01:15:29]**

Sudah dipanggil?

**331. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:31]**

Mereka datang.

**332. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]**

Mereka datang.

**333. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:33]**

Katanya itu waktu saya, kita datang (...)

**334. KETUA: SUHARTOYO [01:15:34]**

Cuman Pak Habi Rahman datangnya kesiangan.

**335. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:38]**

Ke KPU.

**336. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:38]**

Enggak, kita enggak tahu, Pak, kalau enggak datang ke KPU kita enggak tahu.

**337. KETUA: SUHARTOYO [01:15:44]**

Ya, apa? Kata, Bapak ketemu enggak dengan Pak ... Pak Gusnan itu?

**338. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:15:49]**

Enggak, Pak, waktu itu siang komisionernya katanya ke Bengkulu semua, Pak. Kita datangnya siang.

**339. KETUA: SUHARTOYO [01:15:51]**

Oke. Tapi, Saudara tidak pernah dipanggil, ya?

**340. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:00]**

Enggak pernah, Pak.

**341. KETUA: SUHARTOYO [01:16:04]**

Oleh KPU? Bapak, enggak ke Bawaslu?

**342. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:07]**

Ke Bawaslu waktu itu kalau sudah menerima surat ini, Pak, kami ke Bawaslu juga, Pak.

**343. KETUA: SUHARTOYO [01:16:11]**

Bawaslu.

**344. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:12]**

Tapi cuma nanya.

**345. KETUA: SUHARTOYO [01:16:14]**

Apa kata?

**346. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:15]**

Tanggapan Bawaslu katanya enggak bisa perorangan kalau ... kalau ini ... kalau mau apa melaporkan ... melaporkan yang ... yang kita laporkan ke KPU itu, Pak.

**347. KETUA: SUHARTOYO [01:16:28]**

Tidak bisa perorangan maksudnya?

**348. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:29]**

Ya.

**349. KETUA: SUHARTOYO [01:16:30]**

Maksudnya seperti apa harus?

**350. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:32]**

Harus katanya siapa yang dirugikan, Pak, calon.

**351. KETUA: SUHARTOYO [01:16:32]**

Oh, calon.

**352. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:32]**

Yang mencalon ataupun kuasanya, Pak.

**353. KETUA: SUHARTOYO [01:16:32]**

Yang keberatan?

**354. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:32]**

Ya, makanya kita enggak kita lanjutkan lagi, Pak.

**355. SAKETUA: SUHARTOYO [01:16:42]**

Dengan Pak siapa Bawaslu yang ketemu?

**356. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:44]**

Stafnya saja, Pak.

**357. KETUA: SUHARTOYO [01:16:45]**

Staff nya.

**358. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:46]**

Ya, Pak Rofi, Pak.

**359. KETUA: SUHARTOYO [01:16:48]**

Nah, stafnya jangan-jangan tidak diberi mandat untuk menjawab hal-hal yang seperti itu, ya, nanti kita tanya Bawaslu.

**360. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:16:57]**

Ya, Yang Mulia.

**361. KETUA: SUHARTOYO [01:17:01]**

Terus tidak ada perkembangan berlanjut sampai sekarang?

**362. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:17:03]**

Enggak sudah habis tahapannya, Pak.

**363. KETUA: SUHARTOYO [01:17:10]**

Sudah, ya.

Kalau, Pak Gusman Heriyadi, apa yang mau disampaikan di persidangan ini?

**364. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:17:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi saya akan memberikan keterangan terkait dengan proses atau kronologi pendaftaran.

**365. KETUA: SUHARTOYO [01:17:30]**

Saudara, waktu itu sebagai apa? Bapak, sebagai apa waktu itu waktu ada pendaftaran ini?

**366. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:17:39]**

Saya sebagai Ketua Divisi Teknis.

**367. SKETUA: SUHARTOYO [01:17:37]**

Divisi Teknis KPU, ya?

**368. SSAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:17:45]**

Ya, KPU, Yang Mulia.

**369. KETUA: SUHARTOYO [01:17:47]**

Bengkulu Selatan.

**370. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:17:47]**

Ya, yang ... yang memang.

**371. KETUA: SUHARTOYO [01:17:49]**

Ya. Bagaimana, Pak?

**372. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:17:50]**

Jadi, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, langsung saya sampaikan proses atau kronologi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungkulu Selatan.

Satu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ... mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungkulu Selatan membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungkulu Selatan yang dimulai tanggal 26 sampai (...)

**373. KETUA: SUHARTOYO [01:18:37]**

Ya, Pak, sudah jangan dibaca semua nanti waktunya.

**374. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:18:39]**

Ya.

**375. KETUA: SUHARTOYO [01:18:40]**

Ini sidang cepat speedy trial istilah nya. Yang ingin, Bapak mau jelaskan di keterangan itu apa?

**376. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:18:49]**

Jadi (...)

**377. KETUA: SUHARTOYO [01:18:50]**

Penekanannya soal apa?

**378. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:18:52]**

Jadi runutnya bahwa kami pelaksana regulasi yang bersifat kira-kira.

**379. KETUA: SUHARTOYO [01:18:59]**

Sudah melaksanakan ketentuan maksudnya?

**380. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:19:01]**

Sudah melaksanakan ketentuan.

**381. KETUA: SUHARTOYO [01:19:01]**

He eh

**382. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:19:03]**

Terus tadi, Yang Mulia, ada juga tanggapan masyarakat.

**383. KETUA: SUHARTOYO [01:19:05]**

Ya.

**384. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:19:07]**

Itu juga kita lakukan klarifikasi langsung ke yang bersangkutan secara administrasinya (...)

**385. KETUA: SUHARTOYO [01:19:12]**

Ya. (...)

**386. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:19:12]**

Selesai terus kemudian klarifikasi juga kita lakukan semua ke yang bersangkutan lanjut ke Mendagri. Dari ... dari Mendagri juga kita dapat berita acara ini.

**387. KETUA: SUHARTOYO [01:19:28]**

Oke, Pak, siapa yang kemudian menilai laporan itu dari sudut pandang Putusan MK? Siapa yang menilai di internal KPU Bengkulu Selatan? Mengkaitkan dengan keberadaan Putusan MK? Ada tidak? Apanya PKPU tok atau juga dilaborasi dengan Putusan MK? Ada tidak?

**388. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:19:54]**

Ya, beberapa memang untuk pencalonan kemarin kita juga melibatkan eksternal di pencalonan yang (...)

**389. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]**

Ya. Ada tidak yang dibahas soal Putusan MK?

**390. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:20:03]**

Putusan MK kita diskusikan juga.

**391. KETUA: SUHARTOYO [01:20:03]**

Ya.

**392. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:20:03]**

Dan pada intinya (...)

**393. KETUA: SUHARTOYO [01:20:08]**

Kesimpulannya apa?

**394. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:20:09]**

Kesimpulannya kita tetap ada regulasi yang ada, sesuai dengan (...)

**395. KETUA: SUHARTOYO [01:20:13]**

Ya, regulasi Putusan MK regulasi, bukan? Menurut Saudara, tapi Saksi enggak boleh berpendapat pula.

**396. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:20:22]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**397. KETUA: SUHARTOYO [01:20:24]**

Siapa ini?

**398. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:20:25]**

Saya Kuasa Hukum (...)

**399. KETUA: SUHARTOYO [01:20:26]**

Bapak, mau ... mau apa, Bapak?

**400. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:20:31]**

Saksi yang diajukan Termohon ini adalah komisioner, bukankah keterangannya inherent dengan keterangannya sudah diberikan?

**401. KETUA: SUHARTOYO [01:20:37]**

Ya, sama juga Bapak bawa orang kantor gubernur itu bedanya apa, ya kan?

**402. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:20:43]**

Baik. Terima kasih.

**403. KETUA: SUHARTOYO [01:20:44]**

Ya, nanti kami yang menilai, Pak, enggak boleh tanya kalau Putusan MK itu regulasi apa bukan? Tapi sebenarnya, kan ada diskusi Putusan MK.

**404. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:20:53]**

Ya.

**405. KETUA: SUHARTOYO [01:20:57]**

Ada putusan ... ada peraturan PKPU, ya, Pak, ya?

**406. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:21:00]**

Ya, Pak.

**407. KETUA: SUHARTOYO [01:21:01]**

Melibatkan eksternal juga, tapi pada akhirnya yang diputuskan adalah bahwa si Pak Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat ini, khususnya Pak Gusnan ini belum 2 periode. Gitu, ya?

**408. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:21:14]**

Ya, Yang Mulia.

**409. KETUA: SUHARTOYO [01:21:18]**

Apalagi mau dijelaskan? Cukup?

**410. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:21:21]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**411. KETUA: SUHARTOYO [01:21:22]**

Oke, Bu Reren Suryani. Apa yang mau dijelaskan, Bu? Sama? KPU juga? Bukan?

**412. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:30]**

Anggota PPK, Yang Mulia.

**413. KETUA: SUHARTOYO [01:21:32]**

PPK mana?

**414. KETUA: SUHARTOYO [01:21:33]**

Kecamatan Seginim.

**415. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:35]**

Di sini (...)

**416. KETUA: SUHARTOYO [01:21:36]**

Kecamatan?

**417. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:37]**

Seginim

**418. KETUA: SUHARTOYO [01:21:38]**

Gi? Ginim.

**419. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:39]**

Ya, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

**420. KETUA: SUHARTOYO [01:21:41]**

Ginim itu mana, ya?

**421. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:44]**

Salah satu (...)

**422. KETUA: SUHARTOYO [01:21:44]**

Kalau Masmambang masuk Bengkulu Selatan bukan? Masuk, ya?

**423. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:21:50]**

Masmambang itu di Kabupaten Seluma dulu.

**424. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:53]**

Seluma itu.

**425. KETUA: SUHARTOYO [01:21:54]**

Dulu ... dulu masuk ke Selatan, ya?

**426. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:21:55]**

Ya.

**427. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:56]**

Ya.

**428. KETUA: SUHARTOYO [01:21:56]**

Sekarang lagi sudah pemekaran.

**429. SAKSI DARI TERMOHON: GUSMAN HERIYADI [01:21:56]**

Pemekaran.

**430. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:21:56]**

Ya, Serumah.

**431. KETUA: SUHARTOYO [01:22:00]**

Gimana, Bu? Bu Reren?

**432. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:22:01]**

Di sini, Yang Mulia. Kami akan menjelaskan terkait yang disangkakan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Seginim yang melakukan rapat pleno secara tertutup. Pada hari ketiga rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Seginim.

**433. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]**

Ini didalilkan Pemohon juga? Dipersoalkan oleh Pemohon?

**434. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:22:25]**

Benar, Yang Mulia.

**435. KETUA: SUHARTOYO [01:22:26]**

Bukan berkaitan dengan syarat pencalonan?

**436. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:22:28]**

Bukan, bukan, Yang Mulia.

**437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:29]**

Izin (...)

**438. KETUA: SUHARTOYO [01:22:29]**

Mau cerita apa, Bu. Ketika rekapitulasi di BPK?

**439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:32]**

Izin, Yang Mulia.

**440. KETUA: SUHARTOYO [01:22:35]**

Apa lagi nih?

**441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:36]**

Ya. Izin, Yang Mulia.

Ya, berkaitan dengan ini sebenarnya ini ada di dalil Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

**442. KETUA: SUHARTOYO [01:22:47]**

Ya.

**443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:43]**

Tetapi sudah dicabut oleh Pemohon pada saat sidang awal.

**444. KETUA: SUHARTOYO [01:22:43]**

Ya.

**445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:47]**

Kembali ke Permohonan awal, Yang Mulia.

**446. KETUA: SUHARTOYO [01:22:50]**

Ya.

**447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**448. KETUA: SUHARTOYO [01:22:50]**

Ya. Padahal waktu itu Termohon penginnya juga Permohonan awal, kan?

**449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:50]**

Ya.

**450. KETUA: SUHARTOYO [01:22:55]**

Kok, masih ngungkit ... mungkin karena menjawab dua-duanya kali?

**451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:22:55]**

Ya.

**452. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:22:57]**

Ya.

**453. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA  
[01:22:57]**

Izin, Yang Mulia.

**454. KETUA: SUHARTOYO [01:22:58]**

Ya. Karena menjawab dua-duanya, Bapak, ya?

**455. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA  
[01:23:00]**

Prinsipnya kami (...)

**456. KETUA: SUHARTOYO [01:23:01]**

Enggak apa-apa, konsistenlah, Pak.

**457. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA  
[01:23:02]**

Siap.

**458. KETUA: SUHARTOYO [01:23:03]**

Meskipun itu, ya.

**459. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA  
[01:23:03]**

He em.

**460. KETUA: SUHARTOYO [01:23:03]**

Mahkamah juga waktu itu. Silakan di-exercise sendirilah.

**461. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA  
[01:23:08]**

Siap. Siap, Yang Mulia.

**462. KETUA: SUHARTOYO [01:23:09]**

Jadi ketika rekapitulasi tingkat PPK Gim ... Ginim, ya?

**463. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:23:14]**

Ya, Seginim.

**464. KETUA: SUHARTOYO [01:23:15]**

Ada apa yang terjadi, Bu?

**465. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:23:20]**

Di sini kami menjelaskan bahwasanya Panitia Pemilihan Kecamatan Seginim tidak pernah melakukan rapat pleno secara tertutup karena pada faktanya Rapat Pleno di Kecamatan Seginim itu dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari (...)

**466. KETUA: SUHARTOYO [01:23:38]**

Dan bukan ... dan selalu terbuka?

**467. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:23:40]**

Ya, dan selalu terbuka.

**468. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:23:41]**

Ya. Artinya tidak benar, Ibu ingin men ... menjawab dalilnya Pemohon itu, kan?

**469. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:23:46]**

Ya.

**470. KETUA: SUHARTOYO [01:23:47]**

Itu saja?

**471. SAKSI DARI TERMOHON: REREN SURYANI [01:23:50]**

Siap, Yang Mulia.

**472. KETUA: SUHARTOYO [01:23:51]**

Jangan lihat Termohon, Kalau lihat Termohon, itu nanti, kan sudah di warung kopi depan sana. Di sini enggak boleh. Kalau lupa

katakan lupa daripada ngarang-ngarang kan jadi dosa malahan. Sudah disumpah soalnya.

Melsi Kurnia, apa yang mau dijelaskan?

**473. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:24:15]**

Izin, Yang Mulia. Sebenarnya sama dengan yang tadi, ini di Permohonan perbaikan.

**474. KETUA: SUHARTOYO [01:24:20]**

Ya.

**475. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:24:21]**

Terkait dengan (...)

**476. KETUA: SUHARTOYO [01:24:21]**

Enggak, ya, enggak apa-apa.  
Mau jelaskan apa, Bu?

**477. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:24:28]**

Baik, Yang Mulia. Di sini saya akan membantah yang disangkakan juga kepada kami, Pihak Kelurahan Ibul, bahwasannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur beng ... Provinsi Bengkulu, bahwasannya kami di ... disangkakan memanipulas ... memanipulasi surat suara, Yang Mulia.

**478. KETUA: SUHARTOYO [01:24:50]**

Di Kelurahan?

**479. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:24:51]**

Di Kelurahan Ibul TPS 7, Yang Mulia.

**480. KETUA: SUHARTOYO [01:24:53]**

Ibul?

**481. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:24:53]**

Ya.

**482. KETUA: SUHARTOYO [01:24:54]**

Ibul?

**483. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:24:54]**

Ya.

**484. KETUA: SUHARTOYO [01:24:55]**

Padahal itu terjadi tidak itu, Bu?

**485. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:24:58]**

Tidak, Yang Mulia.

**486. KETUA: SUHARTOYO [01:24:59]**

Manipulasi surat suara itu?

**487. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:00]**

Tidak. Pada faktanya (...)

**488. KETUA: SUHARTOYO [01:25:01]**

Ibu sebagai apa?

**489. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:03]**

Eh, gim ... maaf, Yang Mulia, bagaimana?

**490. KETUA: SUHARTOYO [01:25:06]**

Ibu sebagai apa waktu itu?

**491. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:07]**

Saya sebagai Ketua PPS Kelurahan Ibul, Yang Mulia.

**492. KETUA: SUHARTOYO [01:25:09]**

Tidak benar itu, ya?

**493. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:10]**

Tidak benar.

**494. KETUA: SUHARTOYO [01:25:12]**

Apa yang Ibu bisa sampaikan untuk membuktikan ketidakbenaran itu?

**495. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:16]**

Pada ... pada faktanya yang kelebihan surat suara itu pada surat suara gubernur sebanyak 117 lembar, hal tersebut tidak terkait dengan permasalahan Pemilihan dan Penghitungan Rekapitulasi pemil ... Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yang Mulia.

**496. KETUA: SUHARTOYO [01:25:38]**

Tapi berkaitan dengan? Berarti berkaitan dengan yang lain?

**497. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:43]**

Oh.

**498. KETUA: SUHARTOYO [01:25:43]**

Enggak?

**499. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:44]**

Enggak, Yang Mulia.

**500. KETUA: SUHARTOYO [01:25:45]**

Oh. Jadi yang surat suara yang sisa itu?

**501. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:25:50]**

Surat suara yang sisa itu kami sudah memerintahkan kepada KPPS kami untuk memisahkannya kemud ... ke dalam amplop surat suara tidak terpakai, kemudian kami menginstruksikan untuk

menuangkannya di Form Kejadian Khusus Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Yang Mulia.

**502. KETUA: SUHARTOYO [01:26:10]**

Artinya itu terkait dengan gubernur dan wakil gubernur, kan?

**503. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:26:12]**

Ya.

**504. KETUA: SUHARTOYO [01:26:13]**

Nah, ya. Tadi itu kan pertanyaan Hakim ke situ. Tidak terkait dengan Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan tapi terkait dengan gubernur dan wakil gubernur.

**505. SAKSI DARI TERMOHON: MELSI KURNIA [01:26:24]**

Ya, Yang Mulia.

**506. KETUA: SUHARTOYO [01:26:27]**

Kemudian, Pak Sudimawan, silakan, Pak.

**507. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:26:36]**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Sudimawan. Saya Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
Jadi pada hari (...)

**508. KETUA: SUHARTOYO [01:26:49]**

Masih aktif sampai sekarang?

**509. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:26:51]**

Masih, Pak. Sudah ... sudah bolak balik dari tahun 2017-2019.

**510. KETUA: SUHARTOYO [01:26:57]**

Ya. Apa yang mau dijelaskan, Pak?

**511. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:27:00]**

Jadi saya ingin cerita sebentar dulu, Pak, ya. Izin, Yang Mulia. Jadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari, saya ditelepon oleh pengacara Pihak Terkait.

**512. KETUA: SUHARTOYO [01:27:12]**

Tahun berapa, Pak? 2024, ya? 2024?

**513. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:27:16]**

Ya ... 2025.

**514. KETUA: SUHARTOYO [01:27:1]**

2025.

**515. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:27:20]**

Saya ditelepon oleh Pengacara Pihak Terkait untuk menjadi saksi fakta di dalam persidangan ini.

**516. KETUA: SUHARTOYO [01:27:27]**

Ya.

**517. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:27:28]**

Kemudian saya melapor ke Pak Sekda, atasan saya tentang permintaan ini, kemudian Pak Sekda perbolehkan dan saya diberi surat tugas untuk mengikuti persidangan ini. Jadi itulah posisinya. Nah, saya diminta menjelaskan sama seperti Edy Junaidi dari Provinsi Bengkulu tadi untuk menjelaskan surat gubernur selalu SK Mendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian ... dan Pak Gusnan Mulyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dan seterusnya. Jadi, posisi saya diminta menceritakan itu, Pak.

**518. KETUA: SUHARTOYO [01:28:09]**

Ya.

**519. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:28:11]**

Izin, Yang Mulia. Boleh saya langsung saya bacakan? Karena ini sudah saya ketik.

**520. KETUA: SUHARTOYO [01:28:13]**

Ya, Silakan. Yang poin-poinnya saja, Pak.

**521. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:28:19]**

Terima kasih, Pak, Yang Mulia.

Yang pertama. Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan ditangkap KPK tanggal 15 Mei tahun 2018. Kemudian, pada tanggal 17 Mei 2018, Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Gubernur Bengkulu yang tentang ... tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan yang isi surat gubernur tersebut intinya menyampaikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan kewajiban wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah saat kepala daerah mengalami masa tahanan dan/atau berhalangan sementara. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua. Dalam proses selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Maret 2019. Keputusan ini sekaligus menunjuk Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., Wakil Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tahun 2016 sampai 2021 untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan. Keputusan dimaksud mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 Garis (...)

**522. KETUA: SUHARTOYO [01:30:01]**

Sebentar, Pak, yang ... sebentar, Pak.

**523. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:30:03]**

Ya?

**524. KETUA: SUHARTOYO [01:30:04]**

Yang 19 Maret tadi SK-nya nomor berapa, Pak?

**525. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:30:07]**

SK-nya Nomor 131.17-661 tahun 2019.

**526. KETUA: SUHARTOYO [01:30:15]**

Oke. Kemudian ... ya, kemudian yang berikutnya, SK Mendagri lagi?

**527. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:30:16]**

Yang berikutnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Maret 2019. Selain memberhentikan Dirwan Mahmud, keputusan tersebut juga menunjuk Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., Wakil Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan 2016/2021 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Bengkulu Selatan sisa masa jabatan 2016/2021. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung 30 Januari 2019.

**528. KETUA: SUHARTOYO [01:31:19]**

30 Januari?

**529. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:31:19]**

2019. Yang dikeluarkan 19 Maret (...)

**530. KETUA: SUHARTOYO [01:31:20]**

Jadi, bukan, bukan sejak dilantik?

**531. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:31:23]**

Bukan.

**532. KETUA: SUHARTOYO [01:31:24]**

Jadi, mundur malahan? Mundur berapa bulan itu, Pak, berarti, Pak?

**533. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:31:30]**

Dari ditetap ... Maret ke Januari, tiga bulanlah, ya, Pak.

**534. KETUA: SUHARTOYO [01:31:35]**

Tiga bulan, ya. Dikeluarkan bulan Maret, tanggal?

**535. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:31:39]**

19 Maret. Berlaku surut terhitung 30 Januari 2019, Yang Mulia.

**536. KETUA: SUHARTOYO [01:31:45]**

Ya. Oke.

**537. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:31:47]**

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal, 3 Mei 2019. Keputusan ini mengesahkan pengangkatan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., menjadi Bupati Bengkulu Selatan, sisa masa jabatan tahun 2016-2021, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016-2021. Dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai bupati ... sebagai bupati. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Terakhir, Yang Mulia.

**538. KETUA: SUHARTOYO [01:32:43]**

Ya.

**539. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:32:44]**

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-276 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masa jabatan tahun 2016-2021 di kabupaten pada Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Februari 2021. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2021.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**540. KETUA: SUHARTOYO [01:33:14]**

Ya. Pak Su?

**541. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:33:20]**

Sudimawan.

**542. KETUA: SUHARTOYO [01:33:21]**

Dimawan. Bapak di Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan dari tahun berapa, Pak?

**543. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:33:26]**

Saya yang pertama dari tahun 2017-2019, kemudian setelah itu pindah ke Inspektorat, kemudian balik lagi ke bagian pemerintahan itu pada bulan (...)

**544. KETUA: SUHARTOYO [01:33:42]**

Tapi masih di Bengkulu Selatan?

**545. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:33:43]**

Masih tetap, ya.

**546. KETUA: SUHARTOYO [01:33:44]**

Jadi, pegawai mulai tahun berapa, Pak?

**547. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:33:48]**

Dari pegawai mulai tahun 1988.

**548. KETUA: SUHARTOYO [01:33:51]**

88, ya?

**549. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:33:52]**

Ya.

**550. KETUA: SUHARTOYO [01:33:54]**

Dulu di sana itu ada Sekda namanya Pak Yurdas[sic!].

**551. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:33:57]**

Yurdas Lutfi.

**552. KETUA: SUHARTOYO [01:33:58]**

Sudah meninggal, ya?

**553. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:33:59]**

Sudah.

**554. KETUA: SUHARTOYO [01:34:00]**

Pernah jadi sekda, ya?

**555. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:34:02]**

Pernah.

**556. KETUA: SUHARTOYO [01:34:03]**

Tahun berapa itu, Pak?

**557. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:34:06]**

Ndak ingat lagi saya, Pak.

**558. KETUA: SUHARTOYO [01:34:07]**

Eenggak ingat, ya?

**559. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:34:08]**

Mungkin sekitar tahun (...)

**560. KETUA: SUHARTOYO [01:34:12]**

90-an sekian, ya?

**561. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:34:13]**

90-an sekian, Pak.

**562. KETUA: SUHARTOYO [01:34:17]**

Oke. Pak, tolong dijelaskan sekali lagi. Jadi, Pak Gusnan ini, Pak Gusnan ini menggantikan Pak Dirwan Mahmud itu mulai kapan secara riilnya? Bapak tidak usah secara ini sementara, ini ... jadi berhalangannya Pak Dirwan Mahmud itu sejak kapan?

**563. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:34:58]**

Berhalangannya Pak Dirwan Mahmud itu, Yang Mulia, sejak beliau ditangkap KPK.

**564. KETUA: SUHARTOYO [01:35:03]**

Kapan?

**565. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:35:04]**

Tanggal 15 Mei 2018.

**566. KETUA: SUHARTOYO [01:35:06]**

15 Mei 2000?

**567. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:35:08]**

18.

**568. KETUA: SUHARTOYO [01:35:09]**

18. Setelah itu langsung Pak Gusnan menggantikan? Menjalankan tugas-tugas bupati, ya?

**569. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:35:20]**

Ya, kita yang pertama terima surat dari gubernur itu tadi tanggal 17 Mei.

**570. KETUA: SUHARTOYO [01:35:25]**

Ya, berdasarkan surat gubernur itu, Pak Gusnan kemudian menggantikan tugas-tugas bupati karena ditangkap KPK, ya?

**571. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:35:26]**

Ya. Ya, betul, Pak.

**572. KETUA: SUHARTOYO [01:35:32]**

Oke. Sampai kemudian diangkat jadi bupati sampai definitif sampai ... Itu Pak Dirwan Mahmud kembali menjabat lagi tidak?

**573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:35:47]**

Tidak.

**574. KETUA: SUHARTOYO [01:35:48]**

Tidak?

**575. KETUA: SUHARTOYO [01:35:48]**

Tidak. Jadi, Pak Dirwan Mahmud dan Pak Gusnan ini dilantik tahun berapa?

**576. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:35:56]**

Tahun 2016.

**577. KETUA: SUHARTOYO [01:35:59]**

2016?

**578. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:00]**

2016.

**579. KETUA: SUHARTOYO [01:36:02]**

2016. Kemudian Pak Dirwan Mahmud ditangkap KPK 2018 berarti, kan?

**580. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:08]**

Ya.

**581. KETUA: SUHARTOYO [01:36:09]**

Di tanggal 15 Mei?

**582. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:11]**

15 Mei.

**583. KETUA: SUHARTOYO [01:36:12]**

Tapi surat gubernur turun 17 Mei?

**584. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:15]**

17 Mei, ya.

**585. KETUA: SUHARTOYO [01:36:17]**

Itulah menunjuk Pak Wakil, Pak Gusnan ini untuk melaksanakan tugas (...)

**586. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:19]**

Melaksanakan tugas (...)

**587. KETUA: SUHARTOYO [01:36:19]**

Tugas-tugas bupati karena ditinggal oleh Pak Dirwan Mahmud itu.

**588. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:25]**

Ya.

**589. KETUA: SUHARTOYO [01:36:28]**

Sampai masa jabatan, mestinya kalau dia 2016 sampai 2021, ya, Pak.

**590. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:32]**

Ya.

**591. KETUA: SUHARTOYO [01:36:32]**

Sampai 2021 itu Pak Dirwan Mahmud enggak balik lagi?

**592. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:35]**

Tidak.

**593. KETUA: SUHARTOYO [01:36:36]**

Enggak pernah kemudian?

**594. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:36:37]**

Karena, Pak (...)

**595. KETUA: SUHARTOYO [01:36:39]**

Ya, meskipun kemudian turun 3 SK Mendagri yang sifatnya ... apa itu ... mengangkat definitif, menggantikan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pak Gusnan itu, ya. Tapi secara riilnya, Pak Gusnan ini menggantikan posisi atau menggantikan tugas-tugasnya Pak Dirwan Mahmud sejak 17 Mei 2018, berdasarkan surat gubernur itu, ya?

**596. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:37:06]**

Ya.

**597. KETUA: SUHARTOYO [01:37:07]**

Oke. Dari Pemohon dulu ada pertanyaan sebelum Yang Mulia Hakim?

**598. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:37:18]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**599. KETUA: SUHARTOYO [01:37:18]**

Ya.

**600. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:37:19]**

Saya di ... mohon izin bertanya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

**601. KETUA: SUHARTOYO [01:37:24]**

Ya, nanti Bawaslu. Bapak kalau dengan pihak enggak boleh tanya, yang tanya itu dengan Saksi atau Ahli, yang boleh.

**602. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:37:29]**

Baik.

**603. KETUA: SUHARTOYO [01:37:30]**

Ya, kalau pihak enggak boleh (...)

**604. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:37:30]**

Saya.

**605. KETUA: SUHARTOYO [01:37:31]**

Bapak tanya dengan Kuasa Hukum Termohon, Pihak Terkait, enggak boleh. Tapi kalau alat-alat bukti yang diajukan boleh ditanyakan termasuk Ahli, Saksi.

**606. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:37:45]**

Baik, kami tidak bertanya kepada Saksi (...)

**607. KETUA: SUHARTOYO [01:37:45]**

Boleh.

**608. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:37:49]**

Termohon maupun Pihak Terkait.

**609. KETUA: SUHARTOYO [01:37:51]**

Ya, boleh.

**610. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [01:37:52]**

Terima kasih.

**611. KETUA: SUHARTOYO [01:37:53]**

Termohon ada pertanyaan untuk Saksi?

**612. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:37:55]**

Ada, Yang Mulia.

**613. KETUA: SUHARTOYO [01:37:56]**

Silakan.

**614. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:37:56]**

Ke Saksi ini, tadi saya Saksi Habi Burahman, ya. Tadi Saksi bilang, Saksi ini bukan bagian dari tim pemenangan, ya? Bukan, ya?

**615. KETUA: SUHARTOYO [01:38:10]**

Bukan. Anggota masyarakat biasa.

**616. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:38:10]**

Anggota masyarakat.

**617. KETUA: SUHARTOYO [01:38:10]**

Pemilih.

**618. KUASA HUKUM TERMOHON: SATRIA BUDHI PRAMANA [01:38:12]**

Saya mau konfirmasi Saksi. Waktu pleno di Kota Medan, di kecamatan Kota Medan, ada ndak saksi keberatan soal perolehan ketika rekapitulasi ... apa ... TPS 1? Karena informasi yang kami terima, Majelis, yang bersangkutan ini, Saksi yang hadir pada saat pleno, Majelis. Itu saja, Yang Mulia. Mau ... mau konfirmasi, apakah betul bagian dari tim pemenangan atau bukan? Itu saja, Majelis.

**619. KETUA: SUHARTOYO [01:38:42]**

Ya. Bapak, Saksi, mandat, tim pemenangan atau bukan?

**620. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:38:50]**

Saya waktu itu, Pak. Saya kan ada ... ada kecurangan di sana, Pak.

**621. KETUA: SUHARTOYO [01:38:53]**

Bukan. Ya, Bapak statusnya kan da ... datang waktu rekapitulasi pleno, kan?

**622. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:38:59]**

Datang, Pak.

**623. KETUA: SUHARTOYO [01:38:00]**

Tingkat Kabupaten?

**624. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:38:03]**

Di kecamatan saya datang.

**625. KETUA: SUHARTOYO [01:39:03]**

Kecamatan?

**626. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:38:04]**

Ya.

**627. KETUA: SUHARTOYO [01:39:03]**

Di kecamatan atau kabupaten, Pak?

**628. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:06]**

Di kecamatan.

**629. KETUA: SUHARTOYO [01:39:07]**

Kecamatan. Status Bapak apa?

**630. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:10]**

Saya sebagai Saksi, Pak.

**631. KETUA: SUHARTOYO [01:39:12]**

Saksi, saksi untuk Pasangan Calon Nomor?

**632. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:16]**

Rifai-Yevri, Pak.

**633. KETUA: SUHARTOYO [01:39:19]**

Oh.

**634. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:19]**

Waktu itu.

**635. KETUA: SUHARTOYO [01:39:21]**

Oke.

**636. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:21]**

Ya.

**637. KETUA: SUHARTOYO [01:39:22]**

Jadi memang saksi pasangan calon.

**638. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:24]**

Saksi, tapi enggak tim sukses, Pak.

**639. KETUA: SUHARTOYO [01:39:28]**

Ya, artinya kan tadi pilihan.

**640. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:28]**

Ya.

**641. KETUA: SUHARTOYO [01:39:28]**

Apakah saksi, saksi mandat, ataukah tim sukses, ataukah pemilih biasa tadi kan.

**642. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:39:34]**

Ya.

**643. KETUA: SUHARTOYO [01:39:36]**

Nah, ketika kemudian melaporkan itu tadi, kan berarti kami tadi juga sudah termasuk agak bertanya, kan. Kok ini Bapak membuat suratnya seperti dosen tadi itu karena laporan Bapak itu detail banget soal Putusan MK juga disebutkan.

Nah, Bapak itu waktu melaporkan ketika tahapan tanggapan itu, itu posisinya nya sebagai apa? Pemilih biasa atau sudah jadi tim sukses, tim pemenangan atau?

**644. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:40:11]**

Waktu itu tahapan, Pak.

**645. KETUA: SUHARTOYO [01:40:13]**

Waktu di tahapan apa?

**646. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:40:15]**

Tahapan tanggal, saya (...)

**647. KETUA: SUHARTOYO [01:40:15]**

Kapasitas (...)

**648. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:40:15]**

Saya sebagai ini, Pak, sebagai warga Bengkulu Selatan, Pak.

**649. KETUA: SUHARTOYO [01:40:20]**

Bukan tim sukses atau (...)

**650. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:40:22]**

Enggak.

**651. KETUA: SUHARTOYO [01:40:22]**

Tim kampanye, gitu?

**652. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:40:24]**

Tidak, Yang Mulia.

**653. KETUA: SUHARTOYO [01:40:27]**

Cukup, ya Pak? Cukup.  
Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

**654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:40:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bertanya ke Edy Junaidi, Yang mulia. Saksi Edy Junaidi. Ya, tadi Saudara menjelaskan bahwa pada saat itu Saudara Saksi berkedudukan sebagai Kabag Hukum di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

**655. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:40:53]**

Bisa langsung ditanggapi?

**656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:40:55]**

Ya.

**657. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:40:55]**

Bisa langsung ditanggapi?

**658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:40:56]**

Sebentar.

**659. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:40:56]**

Oh, enggak.

**660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:40:55]**

Ya, kemudian intinya Saudara menjelaskan surat gubernur tanggal 17 Mei 2018. Nah itu surat biasa atau keputusan yang disampaikan ke Pak Gusnan selaku wakil Bupati Bengkulu Selatan? Nah, kemudian ketika bupati atau wali kota berhalangan misal naik haji seperti yang disampaikan oleh Ahli tadi, apakah surat seperti itu juga disampaikan? Terima kasih, Yang Mulia.

**661. KETUA: SUHARTOYO [01:41:28]**

Jawab, Pak.

**662. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:41:30]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Jadi saya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan.

**663. KETUA: SUHARTOYO [01:41:32]**

Ya. (...)

**664. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:41:32]**

Biro Pemerintahan (...)

**665. KETUA: SUHARTOYO [01:41:32]**

Ya.

**666. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:41:36]**

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Jadi memang saat itu kami mendapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan fungsi tadi, supervisi terhadap penyelenggara pemerintahan ... pemerintahan daerah, kabupaten/kota. Mohon izin tadi, pertanyaan apa tadi?

**667. KETUA: SUHARTOYO [01:41:56]**

Pertanyaan apa? Diulang, Pak. Lupa.

**668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:41:58]**

Ya, pertanyaannya surat gubernur tanggal 17 Mei 2018 itu, itu surat biasa (...)

**669. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:42:03]**

Oh, ya.

**670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:42:03]**

atau keputusan?

**671. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:42:05]**

Surat biasa ... surat biasa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengingatkan wakil ke ... wakil bupati untuk melaksanakan amanat undang-undang itu. Undang-Undang 23 Tahun 2014 itu.

**672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:42:17]**

Ya, jadi itu hanya mengingatkan isi dari undang-undang, suratnya itu?

**673. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:42:22]**

Ya, kita mengingatkan itu supaya wakil bupati melaksanakan tugas. Apa izin saya bacakan, Yang Mulia? Enggak perlu?

**674. KETUA: SUHARTOYO [01:42:33]**

Tidak perlu.

**675. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:42:34]**

Oh, tidak perlu, ya.

**676. KETUA: SUHARTOYO [01:42:35]**

Ya.

**677. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:42:33]**

Cuma mengingatkan saja.

**678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:42:37]**

Mengingatkan saja?

**679. SAKSI DARI PEMOHON: EDY JUNAIDI [01:42:39]**

Jadi, kita melaksanakan fungsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

**680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:42:44]**

Ya, artinya itu sama saja kalau seperti yang dijelaskan Ahli tadi, ketika terjadi bupatinya misalnya naik haji juga surat seperti sama mengingatkan?

**681. KETUA: SUHARTOYO [01:42:53]**

Ya, tidak. Saksi tidak boleh berpendapat.

**682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:42:56]**

Ya, izin.

**683. KETUA: SUHARTOYO [01:42:57]**

Iho, Bapak kan ingin menyimpulkan sama dengan keterangan Ahli tadi kan pendapat itu, enggak boleh.

**684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:43:01]**

Ya, baik.

Nah, kemudian izin, Yang Mulia. Di dalam surat tersebut terdapat kata dalam pelaksanaan tugas tersebut, wakil bupati bertanggung jawab kepada ... *wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah*. Intinya kepala daerahnya masih ada. Mohon izin, itu benar isi suratnya?

**685. KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]**

Loh Bapak punya gitu kok nanya tadi. Pegang juga kan buktinya?

**686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:43:26]**

Ya.

**687. KETUA: SUHARTOYO [01:43:26]**

Ya.

**688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:43:28]**

Jadi intinya, Yang Mulia. Artinya surat biasa, bukan keputusan. Ya, terima kasih.

**689. KETUA: SUHARTOYO [01:43:28]**

Ya, ini, Pak Husni. Di angka dua perhatikan, jangan Bapak-Bapak sepotong-sepotong membacanya, kan harus fair, ya, di persidangan itu tidak boleh angka duanya terkait hal tersebut di atas, "Maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wakil Bupati Bengkulu Selatan melaksanakan tugas dan wewenang selaku pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

**690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:44:04]**

Ya. Baik.

**691. KETUA: SUHARTOYO [01:44:04]**

Ini harus satu ke satuan, Pak, jangan angle ini menguntungkan Bapak terus baca pada bagian itu saja. Dari sana karena saksi yang Pemohon pasti. Oke, nanti kami yang menilai, mempertimbangkan. Cukup, ya, Pak?

**692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:44:20]**

Ya. Terima kasih.

**693. KETUA: SUHARTOYO [01:44:20]**

Ya.

**694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:44:20]**

Yang Mulia. Ada pertanyaan untuk Saksi yang dari kami, Yang Mulia.

**695. KETUA: SUHARTOYO [01:44:26]**

Silakan, satu pertanyaan.

**696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:44:28]**

Ya. Terima kasih Yang Mulia.

Kemarin kami menambahkan ada 4 alat bukti, Yang Mulia, yaitu P... PT-21 sampai dengan PT-24. Pada PT-21 sampai dengan PT-23, di alat bukti kami menyampaikan daftar pembayaran gaji bupati dan wakil bupati. Nah, di situ di bulan Januari, Februari, dan Maret Pemerintah

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih membayar gaji Pak Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan. Kemudian, pada bulan April berdasarkan slip gaji atau daftar pembayaran gaji itu sudah tidak dibayar lagi. Nah, padahal dilantiknya Pak Gusnan Mulyadi menjadi Bupati itu di 10 Mei 2019. Bertanya kepada Saksi mengapa pada bulan April itu, itu sudah tidak dibayarkan lagi gaji Pak Dirwan? Sementara Pak Dirwan itu ditangkap tanggal 15 Mei 2018 (...)

**697. KETUA: SUHARTOYO [01:45:39]**

Ya. Bapak (...)

**698. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:45:39]**

Terus dibayar gaji sampai dengan Maret 2019.

**699. KETUA: SUHARTOYO [01:45:49]**

Ya, Bapak bisa jawab Pak Sudimawan?

**700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:45:51]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**701. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:45:55]**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

**702. KETUA: SUHARTOYO [01:45:57]**

Ya.

**703. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:45:57]**

Jadi pemahaman saya, Pak Dirwan Mahmud itu bulan April tidak dibayar lagi gajinya, karena beliau pada bulan Maret tahun 2019 sudah diberhentikan.

**704. KETUA: SUHARTOYO [01:46:07]**

Ya.

**705. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:46:07]**

Jadi bupati.

**706. KETUA: SUHARTOYO [01:46:07]**

Ya.

**707. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:46:12]**

Sehingga bulan April tidak digaji lagi.

**708. KETUA: SUHARTOYO [01:46:12]**

Ya. Oke.

**709. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:46:12]**

Itu saja. Pak, Yang Mulia. Terima kasih.

**710. KETUA: SUHARTOYO [01:46:24]**

Cukup, ya?

**711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNI THAMRIN [01:46:24]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**712. KETUA: SUHARTOYO [01:46:24]**

Ya. Dari Bawaslu ada yang mau ditambahkan dari keterangan waktu persidangan sebelumnya? Silakan. Perkenalkan dulu Pak, tadi lupa tidak memberi kesempatan untuk berkenalan.

**713. BAWASLU: MUHAMMAD ARIF HIDAYAT [01:46:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat, Kordiv Hukum Bawaslu Bengkulu Selatan, dan rekan saya Sahran, Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan.

**714. KETUA: SUHARTOYO [01:46:49]**

Ya, silakan. Ada yang ditambahkan dari hal-hal yang dipersoalkan di persidangan ini?

**715. BAWASLU: MUHAMMAD ARIF HIDAYAT [01:46:55]**

Secara substansi tidak ada, cuman ingin menjawab Saksi dari Termohon Pak Habi tadi. Bahwa memang benar tanggal 24 September

itu beliau mendatangi kantor Bawaslu dan menanyakan soal apakah tanggapan masyarakat itu bisa disengketakan atau tidak. Memang dijawab oleh staf kami itu tidak bisa, harus yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan per Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang sengketa yakni, orang yang ... yang bisa mengajukan sengketa itu pertama, bakal pasangan calon dan pasangan calon. Sehingga tanggal 24 tersebut beliau menyampaikan laporan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**716. KETUA: SUHARTOYO [01:47:46]**

Kalau berkaitan dengan perodesasi, itu pernah ditangani oleh Bawaslu Bengkulu Selatan tidak? Yang sampai sekarang masih dibawa ke MK ini?

**717. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:48:00]**

Ada, Yang Mulia, namun itu bersumber dari tanggapan masyarakat. Jadi setelah Pak Habi ini menanyakan soal pengajuan sengketa, sorenya beliau mendampingi Pak Tendri Ahripen ini melaporkan KPU berdasarkan Berita Acara hasil tanggapan masyarakat dan itu sudah kami tindaklanjuti dan hasilnya itu kami hentikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**718. KETUA: SUHARTOYO [01:48:36]**

Kenapa dihentikan, padahal yang dilaporkan sama, ya, berkaitan dengan perodesasi ini?

**719. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:48:45]**

Sama, Yang Mulia, karena berdasarkan hasil klarifikasi kami berda ... KPU sudah menjalankan tugas sebagaimana PKPU Nomor 8 Tahun 2020 ... eh, 2024 dan SE Bawaslu 96.

**720. KETUA: SUHARTOYO [01:49:01]**

Begitu, ya.

**721. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:08]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Saya ini ke Pak Sudimawan, ya. Ini nanti Pak Edy Junaidi juga mungkin bisa nanti kalau perlu ditambahkan keterangan nanti, ya, karena ini ada, ada terkait.

Ini tadi dinyatakan kalau Bukti P-6, ya, dari Pemohon tadi itu terkait dengan keluarnya surat gubernur, ya, tanggal 17 Mei 2018 itu tadi dinyatakan ini untuk menjalankan tugas-tugas bupati, ya, kepada wakil, ya. Itu suratnya tadi dikatakan surat biasa atau berupa radiogram atau ... karena biasanya kan di pemerintahan itu tidak sekedar surat biasa, atau memang betul ini surat biasa untuk menjalankan tugas itu? Bisa dijawab dulu, Pak.

**722. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:50:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu surat biasa, Yang Mulia.

**723. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:22]**

Surat biasa.

**724. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:50:22]**

Menurut apa ... tata naskah dinas surat klasifikasi, surat biasa.

**725. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:28]**

Dia tidak termasuk kategori radiogram gitu?

**726. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:50:32]**

Tidak, bukan.

**727. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:33]**

Tidak, ya.

**728. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:50:33]**

Kalau radiogram lain formatnya.

**729. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:36]**

Lain, ya. Nah, kemudian tadi juga Saksi jelaskan bahwa ada SK Mendagri itu 131 dan seterusnya ada 2, ya, yang satu 661 dan yang satu itu 662. Ada 2 SK Mendagri ini yang di mana di SK nya ini dia berlaku

surut 30 Januari, ya. Itu yang pelantikannya atau yang ... yang mana yang berlaku surut 30 Januari ini, Pak?

**730. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:51:13]**

Yang 30 Januari itu ini, yang pemberhentian Pak Dirwan Mahmud.

**731. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:21]**

Pem ... pemberhentiannya berlaku surut?

**732. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:51:22]**

Pemberhentian berlaku surut.

Nah, tanggal ditetapkan 19 Maret 2019 berlaku surut pada tanggal 30 Januari 2019.

**733. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:35]**

Ya. Nah, selama selain surat itu, tidak ada SK lain dari gubernur untuk menjalankan tugas ini. Jadi hanya surat biasa saja, ya?

**734. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:51:46]**

Ya.

**735. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:47]**

Sejak ditangkap, kan ditangkap 15 Mei. Kemudian 17 Mei keluarkan surat?

**736. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:51:54]**

Ya.

**737. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:55]**

Setelah itu, tidak ada surat sama sekali dari gubernur?

**738. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:51:58]**

Tidak ada lagi, Pak.

**739. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:58]**

Nah, kemudian tadi dijelaskan ada usulan dari DPRD, ya. Lalu gubernur melanjutkan ke Mendagri atas dasarnya itu kemudian keluar SK Mendagri 131 ini?

**740. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:14]**

Tidak tahu saya.

**741. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:15]**

Oh. Tidak tahu, ya?

**742. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:16]**

Tidak tahu.

**743. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:17]**

Oke. Kemudian apakah Saksi tahu kalau pada waktu itu sudah ada putusan pengadilan belum? Terkait dengan Pak Dirwan ini.

**744. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:29]**

Putusan pengadilan itu seingat saya pada tanggal 24 Januari tahun 2019.

**745. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:38]**

24 Januari?

**746. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:40]**

2019.

**747. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:41]**

2019. Itu putusan pengadilan?

**748. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:44]**

Putusan pengadilan.

**749. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:45]**

Itu sudah tetap atau ada banding lagi?

**750. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:48]**

Sudah berkekuatan hukum tetap.

**751. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:49]**

Sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Itu 24 Januari?

**752. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:54]**

Ya.

**753. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:55]**

Tapi SK Mendagri itu dia berlaku surut 30 Januari?

**754. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:52:59]**

Ya.

**755. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:00]**

Oke. Berarti di sini ada ... ada agak kosong, ya?

**756. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:03]**

Selama seminggu.

**757. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:04]**

Kurang lebih seminggu, ya. Oke. Kemudian putusan ini berarti sejak 17 Mei ini, Pak ... ini sudah ... sudah jadi pelaksana, ya?

**758. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:24]**

Dengan surat gubernur tadi (...)

**759. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:25]**

Ya, surat gubernur 17 (...)

**760. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:27]**

Ya.

**761. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:27]**

Mei, ya.

**762. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:27]**

Beliau melaksanakan tugas bupati.

**763. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:31]**

Ya, tugas bupati tanggal 17 Mei 2018.

**764. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:36]**

Ya.

**765. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:36]**

Kemudian baru di SK-nya itu tahun 2019.

**766. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:41]**

Ada SK Menteri Dalam Negeri.

**767. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:43]**

Ya.

**768. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:44]**

Ya.

**769. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:44]**

Yang (...)

**770. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:45]**

Yang 2019.

**771. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:46]**

Nomor 00 ... Nomor 662, ya. Kalau enggak salah yang menyatakan berlaku surut 30 Januari.

**772. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:54]**

Ya.

**773. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:55]**

Oke. Jadi de facto-nya itu 17 Mei sudah, ya?

**774. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:53:59]**

17 Mei sudah melaksanakan tugas bupati.

**775. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:02]**

Oke.

**776. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUDIMAWAN [01:54:03]**

Dengan surat gubernur tadi.

**777. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:05]**

Oke.

Pak Edy Junaidi, ada yang mau ditambahkan dalam proses itu? Atau sudah cukup yang dijelaskan tadi? Sama, ya? Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**778. KETUA: SUHARTOYO [01:54:19]**

Prof. Guntur, silakan.

**779. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:21]**

1 saja ke Pak Habi Burahman, ya.

Pak Habi Burahman, pada hari pencoblosan, ya, 27 November itu, Bapak ... pakai mik ... mik-nya di depan, ya.

**780. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:54:37]**

Ya, Yang Mulia.

**781. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:37]**

Bapak, itu pada waktu itu selaku apa? Bertindak sebagai?

**782. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:54:43]**

Pemilih, Pak.

**783. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:44]**

Pemilih tapi selain sebagai pemilih, Bapak juga sebagai? Apakah jadi Saksi?

**784. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:54:50]**

Belum ada, Pak.

**785. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:51]**

Belum.

**786. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:54:52]**

He em.

**787. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:52]**

Jadi pada hari pencoblosan enggak menjadi Saksi?

**788. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:54:55]**

Belum, enggak.

**789. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:56]**

Kapan, Bapak menjadi Saksi?

**790. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:54:58]**

Pleno kecamatan (...)

**791. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:00]**

Pada saat pleno (...)

**792. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:01]**

Kota Manna, Pak.

**793. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:02]**

Jadi pada hari pencoblosan memang belum sebagai Saksi, hanya sebagai pemilih saja?

**794. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:06]**

Pemilih.

**795. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:07]**

Nanti pada saat pleno di kecamatan, Bapak (...)

**796. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:10]**

Karena ... karena ada ... apa ... kayak pemilihan ganda, Pak.

**797. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:14]**

Pemilihan ganda.

**798. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:14]**

Pemilih ganda.

**799. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:15]**

Bapak, ditunjuk oleh Paslon 03, ya, untuk sebagai (...)

**800. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:21]**

Timnya, Pak.

**801. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:21]**

Saksi tim Paslon (...)

**802. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:22]**

Tim.

**803. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:22]**

03, ya.

**804. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:23]**

Ya.

**805. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:24]**

Untuk di sana, berarti pada tanggal 15 September memang masih sebagai warga biasa?

**806. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:30]**

Pemilih, Pak.

**807. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:30]**

Pemilih, ya.

**808. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:31]**

Ya.

**809. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:31]**

Warga biasa pemilih kan gitu, ya. Nah, itu Bapak, ... ya, pendidikannya?

**810. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:38]**

SLTA, Pak.

**811. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:39]**

SLTA. SLTA, ya.

**812. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:44]**

Ya.

**813. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:44]**

Dan punya pengalaman barangkali menulis surat-menyurat?

**814. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:48]**

Pernah.

**815. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:48]**

Pernah, dimana?

**816. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:49]**

Di media, Pak. Saya, Pak.

**817. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:49]**

Oh. Di media?

**818. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:50]**

Di media. Di LSM juga.

**819. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:52]**

Wartawan?

**820. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:53]**

Ya.

**821. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:53]**

Wartawan.

**822. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:54]**

Ya.

**823. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:54]**

Oh, pernah jadi wartawan?

**824. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:55:55]**

Ya, Pak.

**825. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:56]**

Oh, ya. Jadi dengan pernah jadi wartawan berapa tahun jadi wartawan jurnalis?

**826. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:00]**

Ada sekitar 5 tahunan, Pak.

**827. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:02]**

5 tahunan sebagai jurnalis wartawan memang terdaftar di anu ... nya PWI, ya?

**828. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:09]**

Ada, Pak.

**829. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:09]**

Atau freelance?

**830. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:12]**

Batas kalau UKW-nya masih muda, Pak.

**831. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:14]**

Oh.

**832. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:14]**

Umurnya saja yang tua, Pak.

**833. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:16]**

Gitu, ya?

**834. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:17]**

Ya, Yang Mulia.

**835. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:18]**

Tapi kenapa di KTP-nya, Bapak tidak seperti yang apa pekerjaannya, Bapak selaku wartawan, selaku media?

**836. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:25]**

Karena media kita, Pak, medianya perusahaannya kurang bagus, Pak.

**837. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:31]**

Kurang bagus?

**838. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:31]**

Ya, makanya kita berhenti kembali ke buruh biasa, Pak.

**839. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:35]**

Oh gitu, jadi medianya kurang bagus sehingga, Bapak berhenti jadi wartawan dan balik sebagai BHL, ya? Buruh harian lepas, ya?

**840. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:47]**

Ya, Pak.

**841. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:48]**

Oke dan Bapak, yang membuat sendiri laporan itu?

**842. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:53]**

Ya, Yang Mulia.

**843. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:54]**

Ada yang membantu?

**844. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:55]**

Enggak ada.

**845. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:55]**

Enggak ada sendiri sama sekali?

**846. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:56:59]**

Ya, Pak.

**847. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:59]**

Ini memang jujurly, ya?

**848. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:00]**

Ya.

**849. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:01]**

Jujur, ya?

**850. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:02]**

Ya.

**851. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:03]**

Ini karena sudah disumpah, ya.

**852. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:03]**

Ya.

**853. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:04]**

Bukan karena ada yang membantu atau yang mengkonsepkan.

**854. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:06]**

Enggak.

**855. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:08]**

Atau ada memang karena, Bapak sendiri, ya.

**856. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:10]**

Sesuai dengan data yang ada, Yang Mulia.

**857. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:11]**

Data yang ada dan seterusnya ... karena sebagai jiwa jurnalisnya pernah tentunya membaca berita-berita yang kaitannya dengan keputusan MK, ya? Seperti itu.

**858. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:22]**

Ya, Yang Mulia.

**859. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:22]**

Sehingga mengetahui bahwa Putusan MK begini dan ini ternyata di daerahnya itu ada hal yang berbeda dengan Putusan MK, ya, meskipun dari segi regulasi PKPU-nya bahwa Perbawaslunya itu mengatur, ya, sejak pelantikan seperti itu, ya?

**860. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:43]**

Ya, Yang Mulia.

**861. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:43]**

Begitu, ya?

**862. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:45]**

Ya, cuma ini saja ... apa ... masyarakat bertanya-tanya termasuk kita waktu itu (...)

**863. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:50]**

Ya, apa pertanyaanya?

**864. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:51]**

Ya, banyak berita. Berita-berita media.

**865. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:53]**

Bertanya kepada, Pak Habi?

**866. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:55]**

Bukan di media juga warga Bengkulu Selatan, Pak (...)

**867. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:57]**

Oh, warga.

**868. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:58]**

itu sudah (...)

**869. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:58]**

Sudah menjadi berita?

**870. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:57:58]**

Sudah lama isunya, Pak (...)

**871. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:00]**

Oh, sudah menjadi berita di media.

**872. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:58:02]**

Katanya ada Pak Dirwan ... Pak Gusnan ini sudah 2 periode ada versinya belum 2 periode.

**873. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:08]**

Itu yang menarik hati, Bapak (...)

**874. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:58:10]**

Makanya kita ... kita tanggapin, Pak, sebagai warga, Pak.

**875. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:13]**

Ya, laporan (...)

**876. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:58:13]**

Tapi enggak ... enggak dapat jawaban juga, Pak.

**877. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:16]**

Enggak dapat jawaban.

**878. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:58:17]**

Ya.

**879. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:17]**

Karena tadi seperti Bawaslu sudah sampaikan bahwa ini sudah sesuai dengan Perbawaslu, ya, dan PKPU gitu, ya.

**880. SAKSI DARI PEMOHON: HABI BURAHMAN [01:58:25]**

Ya, Pak.

**881. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:26]**

Oke. Ya, saya cukup, Yang Mulia, dari saya terima kasih.

**882. KETUA: SUHARTOYO [01:58:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik, ya, untuk (...)

**883. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSPANI [01:58:35]**

Yang Mulia, bisakah kami untuk mengajukan satu pertanyaan saja?

**884. KETUA: SUHARTOYO [01:58:41]**

Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Tadi sudah diberi kesempatan.

**885. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSPANI [01:58:46]**

Oke.

**886. KETUA: SUHARTOYO [01:58:48]**

Jadi untuk Permohonan ini dari Pemohon mengajukan bukti tambahan P-53 sampai dengan P-56. Kemudian Pihak Terkait PT-21 sampai dengan PT-24 betul, ya? Kemudian dari Termohon tidak mengajukan bukti tambahan kami sahkan bukti tambahannya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari pemeriksaan perkara ini kami dari Hakim Panel sudah memandang cukup, melihat, menilai cukup sehingga hakim daerah selanjutnya Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan akhir nanti yang Insya Allah yang akan diucapkan pada tanggal, 24 Februari 2025. Kemudian Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dan panggilan sidang pada tanggal tersebut yang mungkin jamnya akan ditentukan sekaligus dalam panggilan itu.

Kemudian berkaitan dengan penambahan bukti sudah tidak bisa lagi termasuk mempelajari bukti atau inzage atas bukti-bukti dari Pihak Lawan. Terima kasih untuk semuanya, baik Kuasa Hukum dan Para Saksi-Saksinya. Mudah-mudahan keterangan-keterangan Para Saksi bisa menjadi bahan pertimbangan kami dalam mengambil putusan. Sudah jauh-jauh dari Manna, Bapak dari Manna kan, ya? Manna itu dulu dari Bengkulu masih banyak ... apa ... yang suka nyebrang-nyebrang yang sekarang mungkin enggak ada lagi, ya, Bu, ya? Ya, dulu tahun 80 sekian saya sering ke sana, Pak. Jadi keluarga Pak Yurdas itu masih kenal baik dengan saya semua meskipun tidak ada hubungan keluarga adik-kakaknya.

Baik. Terima kasih sekali lagi. Cukup, Yang Mulia?

Atas perhatiannya untuk semuanya sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X****SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB**

Jakarta, 12 Februari 2025

Plt.Panitera,

**Wiryanto**

